

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERENCANAAN ANGGARAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

EVI TRIANA DEWI

NIM. 500646592

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2017**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

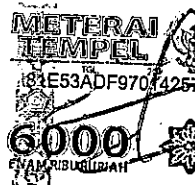
TAPM yang berjudul Perencanaan Anggaran Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan,

2016

Yang Menyatakan



(EVI TRIANA DEWI)

NIM. 500646592

ABSTRAK

Evi Triana Dewi

Nim 500646592

Perencanaan Anggaran Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EVI TRIANA DEWI. Perencanaan Anggaran Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan strategis, penyusunan program kerja dan kegiatan serta proses perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. dikaitkan dengan Daya Serap Anggaran, Proses Penyusunan Anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Anggaran pada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Penelitian ini bersifat kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui (1) data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan (*observasi*), (2) data sekunder melalui analisis Anggaran pendapatan dan belanja daerah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data dianalisis dengan menggunakan metode (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), (3) kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya Daya Serap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung pada SKPD Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain: (1) belum adanya sinkronisasi antara rencana strategis dinas dan kebijakan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah pada SKPD dinas sehingga banyak program dan kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja anggaran tetapi terkendala faktor keterbatasan anggaran. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah masih fokus pada pembangunan infrastruktur daerah meskipun sektor Kebutuhan masyarakat, KTP-el, KK, akte kelahiran dan akte kematian merupakan salah satu sektor unggulan di kabupaten, (2) Penyusunan Rencana Strategis masih belum optimal karena masih rendahnya realisasi anggaran baik di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. (3) sistem pembagian pagu anggaran untuk tiap SKPD bukan berdasarkan perencanaan dari setiap SKPD tetapi berdasarkan pagu anggaran tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan alokasi pendapatan untuk tahun anggaran berikutnya sehingga perencanaan disesuaikan dengan pagu anggaran.

Kata Kunci : Daya Serap Anggaran, Proses Perencanaan, Faktor-faktor Perencanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ABSTRACT

Evi Triana Dewi

Nim 500646592

The Planning Of Budget in Department of Population and Civil Registration Tana Tidung

EVI Triana Dewi. The Planning Of Budget in Department of Population and Civil Registration Tana Tidung.

The aim of this Study are to determine how the strategic planning, preparation of work programs and activities as well as the planning and budgeting of income and expenditure in the local work Department of Population and Civil Registration Tana Tidung have a relationship with Absorption Budget, the Process Budget and factor-Factor affecting the Budget Planning on Population and civil registration services. This research is qualitative research. This study used an (1) Primary data through in-depth interviews and observation, (2) Secondary data through analysis of income and expenditure budget SKPD Population and Civil Registration Office. This study were analyzed using method (1) Reduction of data , (2) Data display, (3) Conclusion. The results showed that low Absorption Budget Revenue and Expenditure Tana Tidung on SKPD Office of Population and Civil Registration caused by various factors, including: (1) There is no synchronization between the strategic planning department and allocation policy of budget revenue and expenditure in the SKPD official so many programs and activities proposed in the work plan budget but budget limitations constrained factor. This happens because the local government are still focusing on the development of local infrastructure despite the sector needs of the citizens, KTP-el, KK, birth certificate and a death certificate are one of the leading sectors in the district, (2) Preparation of the Strategic Plan is still not optimal due to the low budget realization both in SKPD Office of Population and Civil Registration and the Local Government Tana Tidung. (3) The distribution system budget ceiling for each SKPD not based on the planning of each SKPD but based on the previous year's budget ceiling by considering the allocation of revenues for the next fiscal year so that planning tailored to the budget cap.

Keywords: Absorption Budget, Process of Planning, Budget Planning Factors of Population and Civil Registration.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Perencanaan Anggaran di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Nama TAPM : Evi Triana Dewi

Nim : 500646592

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/ Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si

Nip. 19670519 198701 2 001

Pembimbing 2



Dr. Darmanto, M.Ed

Nip. 19591027 198603 1 003

Mengetahui,

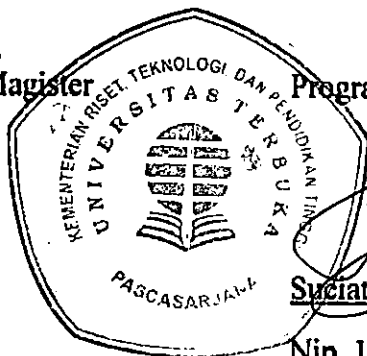
**Ketua Bidang Akademik
Ilmu Administrasi Program Magister
Administrasi Publik**



Dr. Darmanto, M.Ed

Nip. 19591027 198603 1 003

**Direktur
Program Pascasarjana**



Suciati, M.Sc., Ph.D

Nip. 19520213 198503 2 003

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN

Nama : Evi Triana Dewi
NIM : 500646592
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Perencanaan Anggaran di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung
Hari/Tanggal : Juni 2016
W a k t u : Wita

Dan telah dinyatakan Lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Suciati, M.Sc., Ph.D

Penguji Ahli : Dr. Muhammad taufiq, DEA

Pembimbing I : Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si

Pembimbing II : Dr. Darmanto, M.Ed

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa:

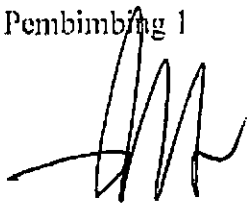
Nama TAPM : EVI TRIANA DEWI
Judul TAPM : Perencanaan Anggaran Di Dinas Kepndudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan
sedah selesai sehingga dinyatakan layak uji dalam ujian sidang Tugas Akhir Program
Magister (TAPM)

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa

Mengetahui:

Pembimbing 1



Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si

Nip.. 19670519 198701 2 001

Pembimbing 2



Dr. Darmanto, M.Ed

Nip. 19591027 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan TAPM ini. Penyusunan TAPM ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Administrasi Publik (MAP) program Pascasarjana Universitas terbuka.

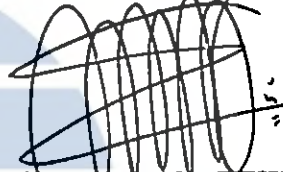
Penelitian dan penulisan TAPM ini mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Disampaikan banyak terimakasih kepada Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing 1 dan Dr. Darmanto, M.Ed selaku Pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan sejak dimulainya sampai dengan selesainya penyusunan TAPM ini. Hal yang sama disampaikan juga kepada.

1. Bapak Bupati Kabupaten Tana Tidung atas pemberian ijin belajar untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka.
2. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed, selaku Ketua Bidang Akademik Ilmu Administrasi Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
4. Bapak Dosen Program Pascasarjana Manajemen Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka.
5. Bapak Kepala UPBJJ-UT Samarinda beserta staf yang selama ini banyak berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka di Kabupaten Tana Tidung
6. Ibu Hj. Umi Suhartini, S.Pd.M.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung atas dorongan moril dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
7. Bapak H. Nurzain, SE selaku Sekretaris Disdukcapil, Ibu Hasnah Kabid Kependudukan, Bapak Samsudin Kabid Pencatatan Sipil, Bapak Zakaria staf yang selalu membantu dalam penulisan ini.
8. Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka di Kabupaten Tana Tidung, yang telah bersama-sama penulis menempuh suka dan duka selama mengikuti pendidikan.
9. Orang tua tercinta H. Burhan Noor, Hj. Tinah Wilinda dan Mertua tercinta Bapak Abdul Gafur IS dan Ibu Siti Mariam yang selalu memberikan bimbingan dan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan.

10. Kepada Swamiku Tercinta Jusriansyah, S.Kom .M.A.P dan anakku Nazril Rafliriansyah anak pertama ku dan Farid Noval Riansyah anak Kedua ku yang selalu mengerti dan selalu mendorong , Pengertian dan kesabaran selama penulis mengikuti pendidikan .
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelanjacaran penelitian sampai pada penulisan TAPM ini.

Disadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan . Akhir kata diharapkan semoga TAPM ini dan Hidayah-Nya.

Tarakan , Juni 2016

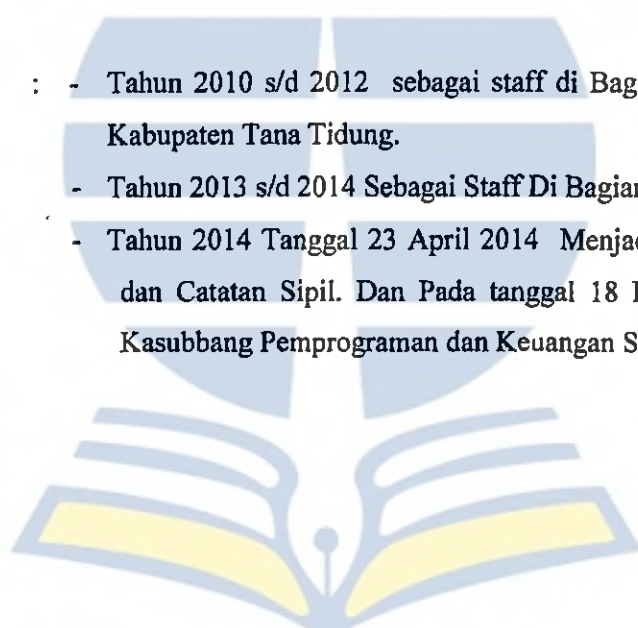


EVI TRIANA DEWI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Evi Triana Dewi
- NIM : 500646592
- Program Studi : Magister Administrasi Publik
- Tempat Tanggal Lahir : Tideng Pale, 23 April 1984
- Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di SD YPTH di Sangasanga pada tahun 1993
- Lulus SMP di SMP YPTH di Sangasanga pada tahun 1999
- Lulus SMA di SMAN 1 di Sangasanga pada tahun 2002
- Lulus S1 di Sain Pala Malang pada tahun 2008
- Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2010 s/d 2012 sebagai staff di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- Tahun 2013 s/d 2014 Sebagai Staff Di Bagian Umum dan Protokol
- Tahun 2014 Tanggal 23 April 2014 Menjadi Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan Pada tanggal 18 Bulan Juni di Lantik Menjadi Kasubbbang Pemrograman dan Keuangan Sampai sekarang .



Tarakan, Juni 2016

Evi Triana Dewi
NIM. 500646592

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Layak Uji	v
Kata pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B.Pertanyaan Penelitian	8
C.Tujuan Penelitian	8
D.Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep dan Teori	14
1. Pengertian Perencanaan.....	14
2. Perencanaan Anggaran	15
3. Konsep kinerja	16
4. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja	18
5. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik.....	22
6. Pengukuran Kinerja melalui Balanced Scorecard.....	26
7. Balanced Scorecard sebagai Alat Menterjemahkan Visi dan Misi	28
8. Keterkaitan Balanced Scorecard dengan Penganggaran	30
C. Kerangka Berfikir Penelitian.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 34

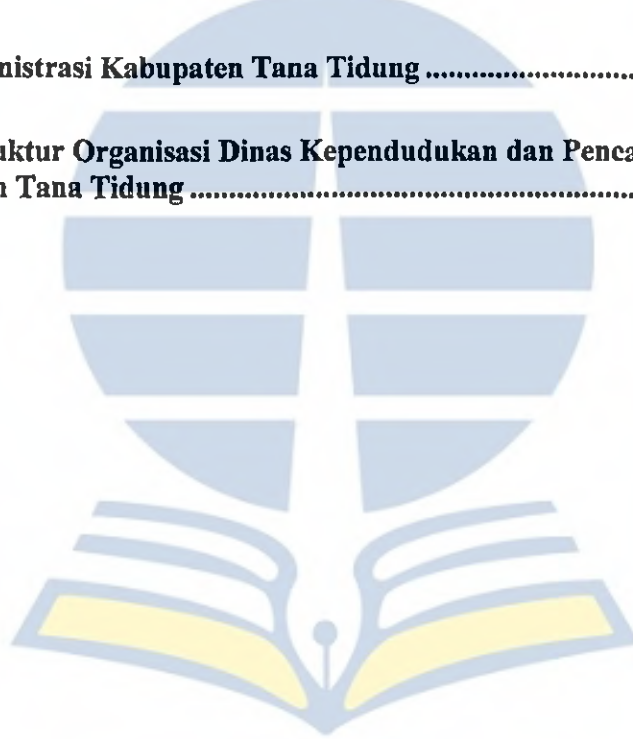
A.Desain Penelitin	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Tipe dn Dasar Penelitian.....	36
1. Tipe Penelitian	36
2. Dasar Penelitian	36
D. Narasumber dan Informan	36
E. Sumber Data	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi	38
2. Wawancara Mendalam	39
3. Studi Dokumen	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A.Deskripsi Objek Penelitian	41
1 . Letak Geografis Kabupaten Tana Tidung	41
2. Wilayah Administratif Kabupaten Tana Tidung	42
2. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	43
B. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung	44
1. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.....	44
2. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung	47
3. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48
C.Hasil dan Pembahasan	53
a. Daya serap anggaran di Kabupaten Tana Tidung	53
b. Proses Perencanaan Anggaran.....	55
c. Pelaksanaan Anggaran.....	60
d. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran.....	68
e. Evaluasi Kinerja	68

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN 70
 A. Kesimpulan..... 70
 B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA..... 75
LAMPIRAN..... 79



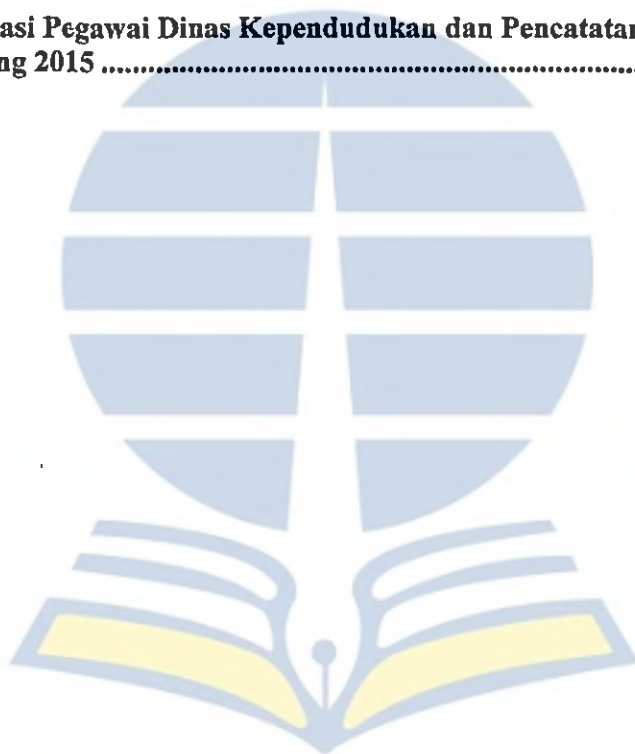
DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja	19
2.4 BSC Sebagai Alat Manajemen Strategi Untuk Menterjemahkan Visi dan Misi	29
2.5 Keterkaitan Balanced Scorecard dengan Penganggaran	31
2.6 Kerangka Pikir Penelitian	32
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Tana Tidung	42
4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung	46



DAFTAR TABEL

1.2 Data APBD Realisasi Anggaran Disdukcapil dalam 5 Tahun 2010 dan 2014	7
4.1 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Perdesaan Kabupaten Tana Tidung	42
4.3 Data Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2015	47
4.4 Data Formasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2015	48



DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara).....	79
2. Wawancara awal dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..	79
3. Wawancara awal dengan Sekretaris Daerah	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk capil) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, terutama dalam hal meningkatkan pelayanan public bagi masyarakat. Peran penting Disdukcapil tersebut salah satunya dapat diukur dari penggunaan anggaran yang dikelolanya. Penggunaan anggaran sebagaimana dinyatakan Mardiasmo (2009) merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sehingga semakin tepat estimasi kinerja yang hendak dicapai artinya semakin baik penggunaan anggarannya. Penggunaan anggaran yang baik akan berdampak terhadap pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan melalui perencanaan yang baik, yaitu perencanaan yang benar-benar berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, sebelum sampai pada proses penggunaan anggaran, perencanaan anggaran menjadi salah satu titik konsentrasi yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Dalam manajemen, "perencanaan" menurut Terry (1977:173) merupakan salah satu fungsi yang memegang peran sangat penting dan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini disebabkan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian hanyalah melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam fungsi

perencanaan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah akan sangat ditentukan oleh proses awal perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak semakin baik pula pada implementasinya di lapangan.

Dalam kaitannya dengan perencanaan anggaran yang baik yaitu yang memenuhi estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode tertentu, maka perencanaan yang mampu memenuhi kriteria tersebut adalah perencanaan anggaran berbasis kinerja. Perencanaan anggaran berbasis kinerja merupakan system perencanaan anggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategi organisasi (Bastian, 2006:171). Perencanaan anggaran berbasis kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.

Value for money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dimana dalam konsep ini elemen-elemen tersebut merupakan elemen pokok dengan masing-masing penjelasan sebagai berikut:

- a. Ekonomi : pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.
- b. Efisiensi : Pencapaian *Output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang rendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi

merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan.

- c. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Secara sederhana sefektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *ouput*.

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas, sedangkan *output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan. *Outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tertentu.

Dalam penerapan konsep *value for money* terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh penyelenggara diantaranya : pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.

Kedua, meningkatkan mutu pelayanan public . Ketiga, menurunkan biaya pelayanan public karena hilangnya inefesiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.Keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.Kelima, meningkatkan kesadaran akan uang public sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Adapun tujuan dalam penerapan konsep *value for money* adalah : pertama, ekonomis yaitu hemat, cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Kedua, efisien, yaitu berdayaguna dalam penggunaan sumberdaya . Ketiga, efektif, yaitu berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2015 Pasal1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks pengawasan atas *output* kinerja merupakan pengawasan yang dilakukan atas *output* yang menjadi sasaran kegiatan yang direncanakan.

Perencanaan anggaran daerah mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah melalui tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Dalam hal ini artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, oleh unit-unit kerja sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Agar APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan nyata dari masyarakat, maka proses penganggaran dimulai sejak perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilaksanakan. Dalam konteks ini tahapan penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan

tidakberorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus diharapkan tercapai di masa mendatang (Bastian, 2006: 275).

Perencanaan anggaran di Disdukcapil Tana Tidung pertama-tama disusun mengacupada RAPBD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Proses Perencanaan APBD dimula dari tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat yang berpedoman pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan atau perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. Pengesahan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan. Tahap pelaksanaan APBD adalah kurun waktu satu tahun anggaran berjalan yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun anggaran yang berjalan. Tahap perhitungan anggaran yang digunakan adalah tiga bulan setelah berakhirnya pelaksanaan anggaran.

Pada pelaksanaan APBD yang berjalan, dalam perkembangannya dapat saja terjadi ketidaksesuaian anggaran yang dibutuhkan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yaitu berupa terjadinya pelampauan atau pun tidak tercapainya

proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Apabila terjadi hal demikian, maka kepala daerah harus memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan (RKUP) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPS) atas perubahan APBD tersebut.

Proses penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja di Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung disusun berdasarkan kebutuhan jumlah dana untuk menunjang kegiatan Disdukcapil dalam 1 tahun. Proses perencanaan anggaran dimulai dengan menghimpun rancangan kerja awal yang dituangkan dalam program berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Tana Tidung serta Visi dan Misi Disdukcapil. Masing-masing bidang yang ada pada Disdukcapil melakukan perencanaan anggaran untuk kemudian data yang telah dihimpun dituangkan dalam bentuk Renja SKPD. Rencana Kerja (Renja) yang telah dihimpun selanjutnya menghasilkan produk berupa RKA SKPD. RKA SKPD ini yang kemudian dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendapat pengesahan menjadi DPA (Dokumen perencanaan Anggaran) SKPD.

Penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung selama 5 tahun periode 2010-2014 rata-rata sebesar 84 % dari pagu yang ditetapkan dalam APBD.

Tabel 1.2 Data APBD Realisasi Anggaran Disdukcapil dalam 5 Tahun 2010 dan 2014

Tahun	APBD (Rp)	Realisasi(Rp)	%	Silpa (Rp)
2010	7.769.980.000,00	6.756.900.000,00	82,7%	1.013.080,00
2011	6.890.000.000,00	5.876.345.000,00	75,3%	1.013.655,00
2012	5.874.975.000.00	4.756.350.000,00	75,5%	1.118.625,00
2013	6.753.800.000.00	5.678.800.000,00	80%	1.075.000,00
2014	7.483.741.250,00	6.300.200.523,00	87,9%	1.183.540.72

Sumber :alokasi dana APBD Kabupaten TanaTidungperiode 2010-2014

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa alokasi dana APBD Kabupaten Tana Tidung periode 2010-2014 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dana yang diterima di tahun pertama. Hal ini diikuti dengan turunnya daya serap anggaran selama 4 tahun dan baru mengalami kenaikan daya serap pada tahun 2014 sebesar 87,9 %.Data ini menggambarkan masih belum optimalnya realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Pada semester pertama tiap tahunnya, penyerapan anggaran umumnya hanya berkutat di sekitar belanja pegawai dan belanja barang rutin saja. Sebagai contoh: belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan)100%dan Belanja Langsung (belanja listrik, air, telpon, internet, ATK, alat kebersihan dan Surat menyurat) 80%. Dari komposisi ini artinya sebagian besar anggaran Disdukcapil diperuntukkan belanja pegawai dan bukan untuk kesejahteraan masyarakat atau peningkatan layanan publik.

Penyusunan anggaran belum sepenuhnya tepat sasaran. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran dapat berdampak pada lemahnya pelayanan public kepada masyarakat. Jika perencanaan anggaran dapat dimaksimalkan, silpa yang ada tentu dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya.

Dengan demikian, mengacu pada daya serap anggaran yang belum maksimal, penulis tertarik untuk meneliti proses Penyusunan Anggaran di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa daya serap anggaran di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tidak maksimal?
2. Bagaimana proses perencanaan anggaran di Disdukcipil Kabupaten Tana Tidung?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perencanaan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis mengapa daya serap anggaran tidak maksimal.
2. Menganalisis bagaimana proses perencanaan anggaran yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Secara Mekanis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan proses penyusunan anggaran di Kabupaten Tana Tidung, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Secara Teori, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan serta pemahaman atas masalah proses penggunaan anggaran dengan membandingkan antara teori yang telah diperoleh dengan kondisi nyata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat di gunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian. Dengan mempelajari terdahulu, mengetahui latarbelakang permasalahan yang diangkat serta metodologi yang digunakan untuk mengungkap fakta-fakta dan peristiwa dalam penelitian-penelitian sebelumnya diperoleh posisi atau keberadaan penelitian ini. Dengan mempelajari penelitian terdahulu diharapkan penelitian biasa menjadikan kontribusi yang berbeda baik dari segi proses maupun hasil. Karena pada dasarnya setiap penelitian akan memberikan kontribusi yang bias memperkaya hasanah keilmuan, dari ragam permasalahan baik secara empiris, normal, maupun teoritis, dalam fenomena kemasyarakatan maupun kelembagaan baik public maupun privat, bahkan fenomena Negara atau lintas Negara.

Beberapa Penelitian yang menjadi hasanah dalam penelitian ini adalah : *Participatory planning : Defining the theoretical and practical emphases in the two approach* yang dilakukan oleh Killian and friends (2008) penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mendasari konsep perencanaan serta menganalisis hubungan antara perencanaan partisipatif dan penganggaran partisipatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian penelitian dari Morteza Zeynalian Tentang *Designing a multipurpose optimization model for budget allocation using a hierarchical approach* meneliti tentang model optimasi desain untuk penganggaran

yang *multipurpose, multilevel, multi stagedan multiliner* dalam *European journal of economic* (2010).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa APBD harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja membuat SKPD sebagai unit pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang benar-benar baik, artinya sesuai dengan kebutuhan, ekonomis, efisien, dan efektif.

Penelitian tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah telah diteliti oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Sugih Arti (2005), yang telah melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok*, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja variabel ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok dan Penganggaran berbasis kinerja variabel efisiensi dan efektivitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok. Kemudian, Kurniawan (2009) melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV PRIANGAN*, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Harjanti (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

Herawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Di Kota Jambimempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian akuntansi), variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3).

Muda (2005) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan dan terdapat pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa t hitung $27,697 > t$ tabel $1,645$. Terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran secara bersama-sama

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan.

Putra (2010), meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun, dengan variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan variabel dependen kinerja SKPD. Menyimpulkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Yusriati (2008), meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja SKPD di Pemkab Mandailing Natal, dengan variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja dan variabel dependen kinerja SKPD. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD, disisi lain penerapan anggaran berbasis kinerja di SKPD yang ada di Pemkab Mandailing Natal masih relative rendah.

Julianto (2009) meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD di Pemkab Tebing Tinggi, dengan variabel independen Anggaran Berbasis Kinerja dan variabel dependen kinerja SKPD. Dari hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD di Pemkab Tebing Tinggi.

Nina (2009) meneliti Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah, dengan variabel independen Penganggaran Berbasis Kinerja dan variabel dependen Akuntabilitas Instansi Pemerintah dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah.

B. Konsep dan Teori

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah salahsatu fungsi yang, sangat penting dalam sebuah manajemen. Terry (1977;173) menjelaskan bahwa perencanaan sangat vital dalam manajemen. Tanpa aktifitas yang ditentukan dengan perencanaan, tidak mungkin untuk mengorganisasi, menjalankan, dan mengontrol perusahaan.

Perencanaan adalah sebagai proses pengambilan keputusan kontinyu dan bersiklus, melalui serangkaian tahapan yang berhubungan secara sistematis, dengan tujuan untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih rasional. Beberapa konsep dan pengertian tentang perencanaan dikemukakan oleh para pakar, antara lain Conyer yang memberikan pengertian tentang perencanaan sebagai berikut : “ the activity of planning as a continuous, cyclical process of decision-making, which should involve working through a series of linked stages in a systematic and orderly

fashion in order to achieve better, and especially more rational decisions “ (Conyers dan hills, 1990; 57) yaitu artinya kegiatan perencanaan sebagai proses siklus terus menerus pengambilan keputusan, yang harus melibatkan bekerja melalui serangkaian tahapan terkait secara sistematis dan teratur untuk mencapai yang lebih baik, dan keputusan terutama yang lebih rasional.

2. Perencanaan Anggaran

Aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi, aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik. Oleh karena itu penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pengawasan dan pelaporan.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresantasikan dalam bentuk rencana prolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran public merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi mengenai estimasi apa yang akan dilakukan organisasi yang akan datang.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa, anggaran sector public merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran /belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (Mardiasmo: 2005). Anggaran sector public harus bisa memenuhi kriteria yaitu merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan

dan keinginan masyarakat dan menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah provinsi atau daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2005), rencana anggaran sector public penting karena beberapa alasan yaitu :

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan social, ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas
- c. Anggaran diperlukan untuk menyatakan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

3. Konsep Kinerja

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Menurut Arnia (2001) kinerja (*performance*) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu fungsi kerja atau aktivitas selama periode tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Kinerja Manajerial (*Managerial Performance*) merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial seperti: perencanaan, investigasi (Warisno, 2008). Sedangkan menurut Otley (1999), kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kinerja adalah hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan pengertian tersebut jelas kinerja dapat dilihat dan diukur dari berbagai sudut jika dihubungkan dengan pengertian prestasi yang diperlihatkan.

Menurut Mardiasmo (2004), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Di samping itu pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

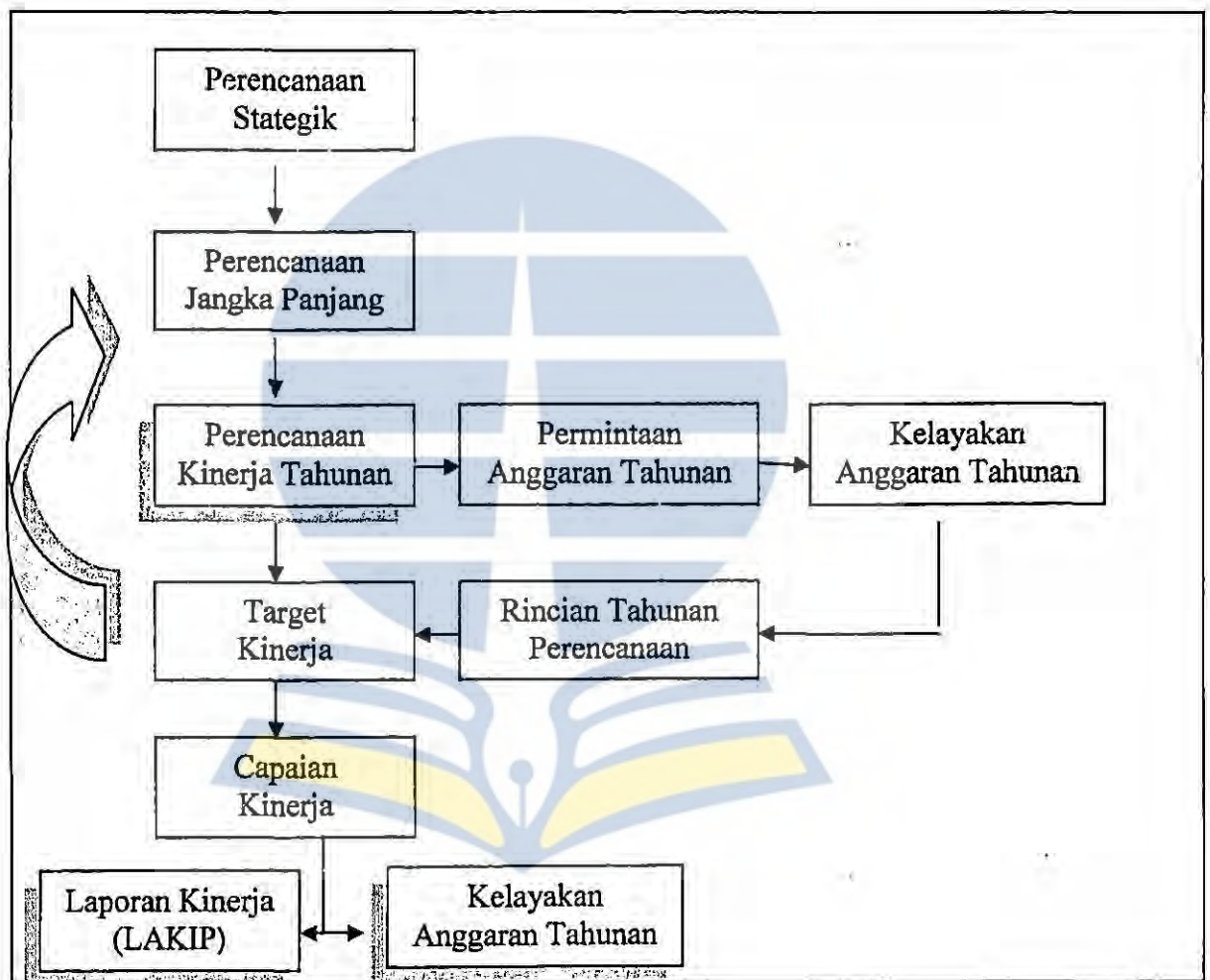
Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, di mana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran (badan/dinas/camat/kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Semakin bagus tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran maka akan semakin tinggi tingkat kinerja SKPD tersebut.

Ada tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/organisasi non bisnis, yakni *responsivitas*, *responsibilitas*, dan *akuntabilitas*. Dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, banyak indikator yang dapat dipergunakan, yaitu: (1) produktivitas; (2) kualitas layanan; (3) *responsivitas*; (4) *responsibilitas*; dan (5) *akuntabilitas*. Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja.

4. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara sistematis dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005:16) pada dasarnya tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus. Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam rencana strategik secara keseluruhan



Sumber : Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005:16).

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa awal proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Penyusunan rencana strategis organisasi adalah proses untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dan menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholders* utama. Pada umumnya rencana strategis memiliki jangka waktu beberapa tahun kedepan yang komponennya setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program untuk mencapainya serta menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan suatu program/kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut setiap tahunnya dituangkan suatu rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang didalamnya yang memuat seluruh indikator dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan pemerintah untuk satu periode tahunan.

Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, instansi menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hasil-hasil (*outcome*) yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan hubungan

antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis maupun rencana kinerja tahunannya.

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah disetujui, masing-masing instansi menyusun rencana operasional tahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanya termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya.

Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang telah disetujui dan rencana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat kepada pihak yang menerima amanat tentang target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, yaitu yang telah disepakati pihak eksekutif dan legislatif. Kesepakatan kinerja kemudian dituangkan dalam dokumen kontrak kinerja.

Pada akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam kesepakatan kinerja dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan

kinerja meliputi laporan kinerja keuangan dan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya.

5. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, sistemnya akan semakin baik dan dapat mengakomodasi berbagai prinsip yang ada apabila mampu mengenali atau mengidentifikasi jenis-jenis anggaran yang terdapat pada sector public. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis anggaran sector publik (Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah. 2007).

Pertama, Line-item Budgeting

Line Item Budgeting adalah proses penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana dan berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini relatif dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut '*traditional budgeting*'. Walaupun tak dapat disangkal '*line-item budgeting*' sangat populer penggunaannya karena dianggap mudah untuk dilaksanakan.

Kedua, Incremental Budgeting

Penganggaran dengan metode ini pada dasarnya menggunakan line item budgeting, tetapi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi nilai anggaran dari tahun sebelumnya. Metode ini banyak digunakan oleh Negara kaya dan dalam situasi ekonomi politik yang relatif stabil. Kondisi pendapatan yang terbatas dan keadaan ekonomi yang tidak stabil membuat cara ini tidak efektif karena kenaikan

atau penurunan dari tahun sebelumnya tidak bisa dibuat sesuai dengan kondisi nyata dan kemungkinan adanya pendapatan dan belanja yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan.

Ketiga, Revenue Budgeting

Penganggaran dengan metode revenue dengan dasar kemampuan suatu Negara untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya disusun belanja sesuai dengan kemampuan tersebut. Apabila disusun anggaran belanja sesuai dengan kemampuan memperoleh pendapatan Negara, anggaran tersebut berimbang, selain itu apabila melebihi pendapatan Negara, anggaran belanja tersebut disebut anggaran pengeluaran. Metode ini efektif digunakan oleh suatu Negara yang sangat terbatas pendapatannya, tetapi situasi ekonomi dan politiknya relatif stabil.

Keempat, Repetitive Budgeting

Metode penganggaran dengan mengulang anggaran dari tahun ketahun sebelumnya karena adanya kondisi yang tidak stabil di bidang ekonomi dan politik. Pertimbangan memakai metode ini karena tidak memungkinkan menyusun dengan metode lain karena situasi yang tidak stabil. Daripada membuat anggaran yang tidak memadai, lebih baik menggunakan anggaran tahun lalu yang tentunya juga tidak sesuai.

Kelima, Supplemental Budgeting

Metode ini digunakan dengan cara membuat anggaran yang membuka kesempatan untuk melakukan revisi secara luas. Cara ini dilakukan apabila Negara tidak ada kesulitan pendapatan, tetapi Negara memiliki kendala administrasi.

Kelebihan metode ini adalah menyesuaikan anggaran dengan kondisi nyata yang sedang berlangsung akan tetapi, kelemahan metode ini adalah ketidakjelasan arah prioritas dari belanja Negara.

Keenam, Planning Programming Budgeting System

Metode PPBS dikembangkan untuk para pengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah. Metode ini dilakukan karena adanya keterbatasan pendapatan dan banyaknya belanja merupakan pertimbangan dilakukannya analisa biaya dan manfaat. Untuk itu pilihan yang menghasilkan manfaat yang besar akan diambil lebih dahulu. Dengan kata lain penyusunan sesuai daftar prioritas berdasarkan program yang memiliki manfaat yang terbesar, dan memerlukan waktu yang lama dan secara teknis sulit dipraktekkan karena mengukur manfaat dengan menilai uang tidak mudah.

Adanya standar ini yang disampaikan kepada legislatif akan memudahkan fungsi pengendalian dan pengawasannya. Penganggaran ini disusun dengan pendekatan fungsi sehingga program yang sama antar unit bisa dijadikan satu sehingga tidak ada tumpang tindih antar departemen dan juga mengukur biaya dan manfaat dalam jangka panjang sehingga alokasi sumber daya untuk jangka waktu tersebut dapat dimanfaatkan, serta anggaran selama beberapa tahun bisa disusun berdasarkan analisis ini.

Ketujuh, Zero Base Budgeting

Sesuai dengan namanya, anggaran disusun dari nol meskipun pada tahun sebelumnya, telah dilakukan proses penganggaran. Anggaran ini tidak bergantung

pada tahun sebelumnya sehingga sering dijumpai program yang tidak efektif. Model dari ini dibuat dengan *decision package* atau suatu dokumen yang menggambarkan informasi terkait dengan efek dari berbagai alternatif kegiatan prosesnya adalah pertama, pengidentifikasian unit keputusan yang akan melaksanakan program. Kedua, pengembangan paket keputusan program yang direncanakan dan juga dinyatakan dalam program itu tersebut dijalankan atau ada alternatif yang terpisah. Ketiga, membuat peringkat unit keputusan yang membutuhkan dana banyak dan rendah.

Keuntungan dari metode ini menghapus tidak efektifnya satu program, memungkinkan program baru, pada setiap aktivitas ada tujuan yang jelas dan melibatkan seluruh level. Akan tetapi kerugian adalah terlalu optimis bahwa perhitungannya mudah, tidak mudah mengkonsolidasi unit dan tingkatan.

Kedelapan, Performance Budgeting

Dengan metode ini anggaran disusun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur dari berbagai kegiatan. Faktor penentu dari kegiatan ini adalah efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan standar biaya yang dapat dipakai dalam menyusun anggaran tahun berikutnya dan disesuaikan dengan pertimbangan logis. Kelebihan metode ini adalah bahwa kegiatan didasarkan pada efisiensi dengan adanya standar biaya dari masa lalu (Yuwono dan Hariyandi, 2005).

6. Pengukuran Kinerja melalui Balanced Scorecard

Penggunaan anggaran sebagaimana dinyatakan Mardiasmo (2009) merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sehingga semakin tepat estimasi kinerja yang hendak dicapai artinya semakin baik penggunaan anggarannya. Penggunaan anggaran yang baik akan berdampak terhadap pelayanan publik.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka (Bab 1), perencanaan anggaran menjadi salahsatu titik konsentrasi yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran agar pelayanan public dapat berlangsung dengan baik. Salah satucara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dan menentukan pencapaian tujuan organisasi dapat digunakan konsep Balanced Scorecard (BSC). BSC merupakan pendekatan baru terhadap manajemen yang dikembangkan pertama kali oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992 yang diperuntukkan perusahaan-perusahaan bisnis komersial. BSC menyediakan suatu instrument yang dibutuhkan organisasi untuk menuju kepada keberhasilan persaingan masa depan. Pada masa sekarang, organisasi harus bersaing dalam lingkungan yang kompleks sehingga pemahaman yang akurat tentang tujuan serta metode untuk mencapainya adalah amat vital (Kaplan dan Norton, 2000;2).

Konsep Balanced Scorecard pada generasi pertama (Tahun 1990-1991) yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengukuran kinerja diturunkan dari visi dan

strategi dengan memandang kinerja perusahaan dari 4 (empat) perspektif yaitu : a) perspektif pelanggan, b) financial, c) proses bisnis internal, dan d) pembelajaran dan pertumbuhan. Penggunaan BSC saat ini telah melalui beberapa modifikasi, sehingga siap untuk beradaptasi dalam lingkungan organisasi public dan non profit (Niven, 2003;27). Perbedaan utama organisasi sector public dengan sector swasta terutama adalah pada tujuannya (bottom line).

Sektor swasta (bisnis/komersil) bertujuan untuk mencari laba (profit maximization) sedangkan sector public bersifat nonprofit motive. The bottom line organisasi sector public adalah maksimalisasi pelayanan public (public service maximization).

Rerangka balanced scorecard tidak terbatas untuk organisasi bisnis, akan tetapi organisasi sector public dapat menggunakannya dengan penempatan tumpuan (leverage) yang berbeda. Jika dalam organisasi bisnis tumpuannya adalah pada perspektif keuangan, maka dalam organisasi sector public tumpuannya adalah pada perspektif pelanggan (Mahmudi, 2010; 143).

Mulyadi (2009;141) menyebutkan bahwa BSC dapat diterapkan secara efektif di organisasi sector public dan organisasi nirbala karena beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Semua organisasi didirikan dengan misi tertentu untuk mewujudkan visi tertentu.

Untuk mewujudkan visi melalui misinya, organisasi memerlukan strategi untuk

mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber dayanya. Misi, visi dan strategi untuk menghasilkan action plans.

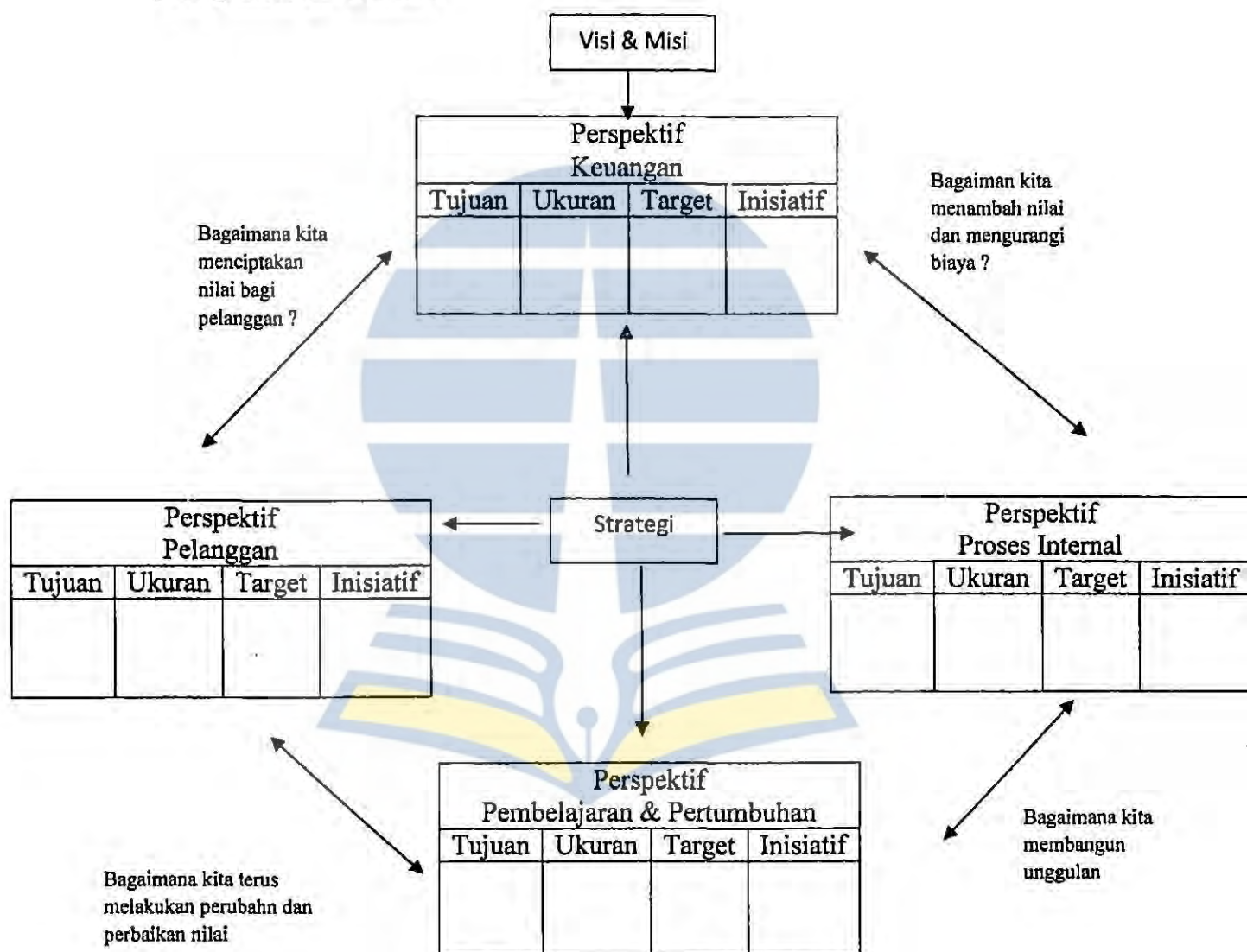
- b. Semua organisasi dituntut untuk menghasilkan kinerja berupa keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui inisiatif strategis pilihan;
- c. Semua organisasi membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban yang diberi peran untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah diharapkan.
- d. Sesuai kontribusinya dalam mewujudkan misi organisasi, pusat pertanggungjawaban dalam semua organisasi dapat ditetapkan perannya sebagai mission center atau service center.

7. Balanced Scorecard sebagai Alat Menterjemahkan Visi dan Misi

Salah satu ukuran kinerja yang dapat dinilai melalui BSC adalah bagaimana suatu visi dan misi diterjemahkan. Kaplan dan Norton (2008: 8) mengatakan BSC digunakan sebagai alat untuk menterjemahkan visi dan misi organisasi kedalam sasaran strategis dan inisiatif strategis yang terukur, terencana, komprehensif, koheren dan seimbang. BSC digunakan sebagai alat untuk pemokus strategi (*strategy focused*) sehingga dapat mengatasi masalah terjadinya keputusan visi, misi, strategi, inisiatif strategi, ukuran kinerja, target kinerja, anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Penentu target kinerja dan inisiatif merupakan mata rantai untuk mengantarkan visi, misi dan tujuan organisasi ke tahap implementasi. Setelah tujuan, ukuran kinerja, target kinerja dan inisiatif kinerja ditetapkan, langkah berikutnya

adalah membuat kaitan antara komponen-komponen dalam kartu skor yang mencakup empat perspektif. Kaitan tersebut menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis yang lain sebagaimana pada gambar 2.4 berikut :



Sumber : Kaplan dan Norton (2000; 8)

Gambar 2.4 BSC Sebagai Alat Manajemen Strategi Untuk Menterjemahkan Visi dan Misi.

Penentuan target kinerja dan inisiatif kinerja strategi merupakan mata rantai untuk mengantarkan visi, misi dan tujuan organisasi ke tahap implementasi. Setelah tujuan, ukuran kinerja, target kinerja dan inisiatif kinerja ditetapkan, langkah berikutnya adalah membuat kaitan antara komponen-komponen dalam kartu skor yang mencakup empat perspektif. Kaitan tersebut menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lain.

Setelah dibuat sasaran strategis dan *strategic linkage*, organisasi harus menjabarkan sasaran strategis tersebut kedalam ukuran kinerja, target kinerja dan inisiatif strategis untuk masing-masing perspektif. Sasaran strategis adalah sasaran yang hendak dicapai organisasi yang merupakan terjemahan dari visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. Setelah ditentukan sasaran strategis, tahap berikutnya adalah menentukan ukuran kinerja. Ukuran kinerja tersebut untuk mengukur kesuksesan.

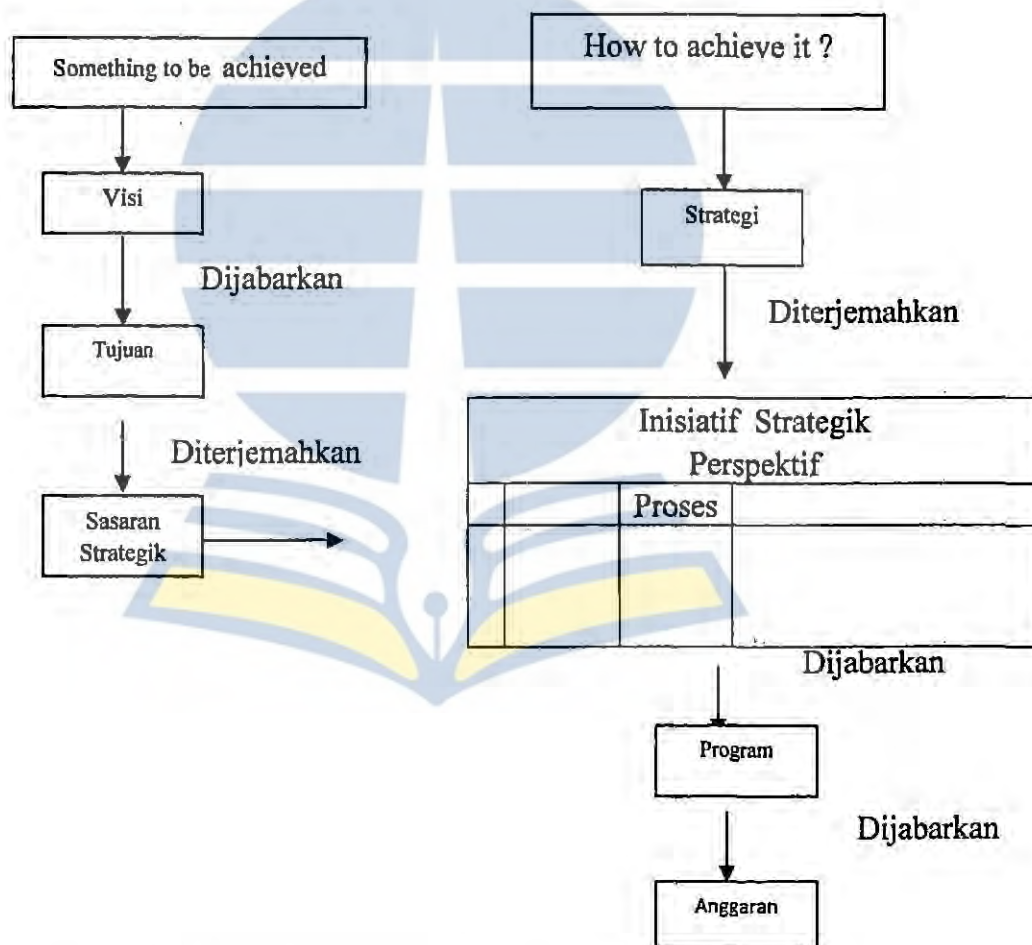
Manajemen kinerja sektor public tidak berhenti pada pembuatan ukuran kinerja, manajemen harus menentukan target kinerja untuk masing-masing perspektif. Target kinerja tersebut dijabarkan dalam inisiatif strategis yang merupakan tindakan atau program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keterkaitan Balanced Scorecard dengan Penganggaran

Setelah manajemen menjabarkan sasaran strategis kedalam inisiatif strategis, tahap berikutnya adalah menjabarkan inisiatif strategis kedalam program dan anggaran. Balanced scorecard yang telah disusun sangat mempengaruhi proses

pengendalian manajemen berikutnya, yaitu penganggaran. Inisiatif strategis harus dijabarkan dalam program, selanjutnya dijabarkan dalam anggaran.

Peran BSC sebagai penerjemah visi dan misi organisasi kedalam sasaran strategis dan inisiatif strategis dan inisiatif strategis melalui empat perspektif yang kemudian dijabarkan dalam program dan anggaran sebagaimana pada gambar 2.5 berikut :

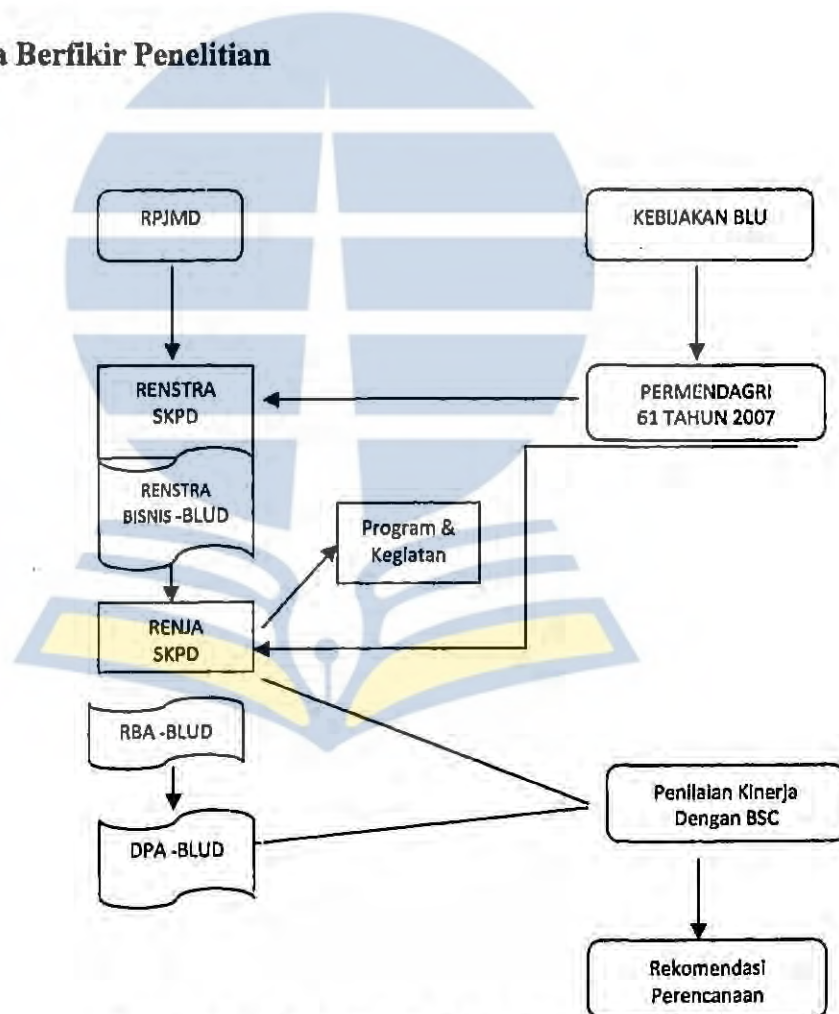


Sumber : mulyadi (2004) dalam Mahmudi (2010;140)

Gambar 2.5 Keterkaitan Balanced Scorecard dengan Penganggaran

Dengan kerangka BSC antara masing-masing tahapan dalam sistem manajemen strategis tidak terjadi keputusan (missing link). Anggaran yang disusun harus berorientasi pada pencapaian target kinerja, tujuan, visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan BSC tidak terjadi keterputusan antara visi, misi dan tujuan organisasi dengan anggaran.

C. Kerangka Berfikir Penelitian



Gambar 2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan melihat anomaly proses perencanaan yang disebut Faludi (1976:11) sebagai meta planning. Meta planning yang dimaksud adalah munculnya program yang sebelumnya tidak ada dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung karena adanya kebijakan penerapan. Anomaly proses perencanaan diteliti pada proses penyusunan rencana tahunan yaitu pada penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah, dalam hal ini penyusunan Renja dan RKA Tahun anggaran 2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tana Tidung.

Selanjutnya dengan adanya anomaly proses perencanaan tersebut penelitian juga dilakukan untuk melihat dampak perencanaan bagi layanan publik melalui pengukuran pada pencapaian kinerja yang di targetkan dalam RPJMD maupun kinerja yang ditargetkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tana Tidung, yang mana kinerja pelayanan public pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tana Tidung diukur dengan metode balanced scorecard.

Peningkatan kualitas pelayanan yang selanjutnya menjadi spirit DISDUKCAPIL pada setiap fungsi manajemen terutama fungsi perencanaan. Oleh karena itu selalu dibutuhkan improvisasi perencanaan untuk terus mengadakan perbaikan (continous improvemen) dalam mewujudkan tujuan Perencanaan yang matang dan dapat sekaligus mewujudkan misi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan dokumenkependudukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian merupakan kombinasi antara apa yang hendak diperoleh setelah melakukan penelitian (tujuan penelitian) dengan unsur-unsur penelitian. Dalam penelitian pendekatan kualitatif digunakan desain deskriptif kualitatif atau kuasi kualitatif atau desain kualitatif dengan menempatkan teori pada data yang diperoleh (Bungin, 2007:68). Desain ini oleh *whitney* dalam Nazir (1988:63) disebut sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan etika penelitian. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data berupa tulisan, ungkapan-ungkapan, serta perilaku manusia yang diamati untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang berhubungan dengan proses perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan para pihak baik perseorangan, tim/kelompok, maupun instansi lain yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran Disdukcapil, serta korelasinya dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung.

Metode Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, oleh karena itu dalam penelitian ini metode yang dianggap tepat dan sesuai dengan masalah penelitian adalah metode kualitatif.

Namun demikian bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga setiap metode lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, mungkin akan menghasilkan temuan yang berbeda.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut Creswell (2010: 4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data (Creswell, 2010:4).

Penelitian Kualitatif mengharuskan peneliti menjadi instrument kunci. Konsekuensi psikologisnya adalah peneliti akan memasuki latar yang memiliki norma, nilai, aturan, dan budaya yang harus dipahami, dipelajari dan digunakan oleh peneliti. Interaksi antara peneliti dengan subyek peneliti memiliki peluang timbulnya interes dan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu maka penelitian ini memerlukan etika penelitian (Spradley, 1980:54). Etika penelitian di sini maksudnya adalah peneliti harus menjaga netralitas atau bersikap netral terhadap temuan di lapangan.

Dalam Penelitian kualitatif sebagaimana disampaikan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan data, dan menganalisis data deskriptif. Data-data yang dimaksud berupa data primer

yang diperoleh dari informan serta hasil dokumentasi peneliti yang berupa tulisan, laporan, surat-surat yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan.

C. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penggunaan tipe ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian, kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, dan selanjutnya menarik kesimpulan (Nasir, 2002).

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang dilakukan adalah wawancara langsung yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu secara langsung dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap refresentatif.

D. Narasumber atau Informan

Informan yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah aparatur daerah yang menangani langsung atau terkait dalam penelitian ini. Adapun yang

ingin diteliti adalah Perencanaan Anggaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Sehingga informan dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat dalam penyusunan anggaran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu staf bagian keuangan, staf bagian pelayanan dan staf bagian kependudukan.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan atau stakeholders yang terlibat langsung dalam proses penyusunan R-APBD. Sumber data berasal dari para informan sebagai data primer, dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan sebagai data sekunder. Untuk memperoleh data data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut .

1. Data Primer

Data primer apa saja yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan variabel pelaksanaan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri dari penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan tahun 2014-2015, Dokumen Anggaran Pemerintah tahun 2014-2015, buku teks yang mengacu pada Pedoman Pemrograman Anggaran dan Anggaran Berbasis Kinerja, baik yang ada pada instansi Pemerintah, DPRD maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas (Sugiyono.2010).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini dikumpulkan data primer dan data sekunder. Menurut kusumayadi dan sugiarto (2000:8) data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari obyek penelitian, bisa merupakan hasil pengumpul orang atau instansi dalam obyek penelitian, laporan dan lain sebagainya. Sehubungan dengan sumber data primer maka pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*Purposive sampling*) yang didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap proses perencanaan dan penganggaran di Disdukcapil. Sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh tidak langsung dari obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari laporan, surat-surat, serta survey yang dilakukan oleh Disdukcapil. Pengumpulan data dilakukan pertama untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang daya serap anggaran, proses perencanaan dan faktor perencanaan anggaran. Kedua untuk menjawab tentang apa faktor pendukung dan penghambat. Untuk rumusan masalah ketiga peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa laporan dan hasil survey yang dilakukan oleh Disdukcapil.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Penulis melakukan kegiatan terhadap proses penyusunan R-APBD di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung secara langsung dengan cara non partisipasi artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara Mendalam (indepth interview)

Wawancara mendalam dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dan tatap muka langsung dengan beberapa informan seperti *stakeholders* yang dianggap mengetahui banyak mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber data.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, karya tulis ilmiah.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kualitatif. Desain deskriptif kualitatif biasa disebut dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu karena masih dipengaruhi oleh kuasi kuantitatif terutama karena menempatkan teori pada data yang diperoleh. Selain itu sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya penekanannya pada deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data dan memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan ke dalam dan data ataupun makna data (Bungin, 2007:146). Meskipun demikian deskriptif-kualitatif mengadopsi cara berpikir induktif dengan proses analisis data sebagai berikut.

Tahapan analisis data deskriptif adalah sebagai berikut: pertama melakukan wawancara dan studi dokumentasi yang difokuskan pada proses

perencanaan dan penganggaran di Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses perencanaan dan penganggaran di Disdukcapil kabupaten Tana Tidung maupun hasil pengukuran kinerja Bappeda, kemudian melakukan indentifikasi revisi-revisi dan pengecekan ulang terhadap data yang ada dari hasil proses indentifikasi data yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan focus penelitian. Langkah ke-2 adalah melakukan penarikan kesimpulan umum dari setiap kategori terhadap informasi yang diperoleh dari klasifikasi data. Langkah ke-3 menelusuri kategorisasi sehingga muncul dalil yang mencirikan kesimpulan ciri-ciri umum. Langkah ke -4 menghubungkan kategorisasi dari data yang diperoleh. Dan langkah ke -5 menarik kesimpulan umum dan menjelaskan teori. Tahapan penelitian kualitatif adalah tahapan analisis kualitatif. Dengan demikian maka tahapan-tahapan analisis itu juga adalah yang dilaksanakan pada saat tahapan penelitiannya.

Jadi model langkah analisis data kualitatif bukanlah teknik analisis data kualitatif melainkan sebuah strategi analisis data yang melekat pada setiap tahapan penelitian kualitatif. Sedangkan metode atau teknik analisis kualitatif adalah alat yang digunakan untuk menggumpulkan data (beberapa alat hanya untuk menggumpulkan data saja) dan sekaligus juga adalah alat analisis data (Bungin, 2007:145).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung terbentuk pada tanggal 17 Juli 2007 hasil Sidang Paripurna DPR RI dengan luas wilayah 4.828,58 km². Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia. Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, dan jumlah kecamatan pada Kabupaten Tana Tidung bertambah 2(dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Betayau., sehingga Kabupaten Tana Tidung memiliki 5 Kecamatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Nunukan
- b. Sebelah Timur Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
- c. Sebelah Selatan Kabupaten Bulungan
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau

2. Wilayah Administratif Kabupaten Tana Tidung



Sumber www.tanatidungkab.go.id

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Tana Tidung

Tabel 4.1 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Perdesaan Kab. Tana Tidung

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas
			Km ²
1	Sesayap	7	1.116,92 km2
2	Tana Lia	5	877, 86 km2
3	Sesayap Hilir	9	1.090, 53 km2
4	Muruk Rian	6	608, 62 km2
5	Betayau	6	1.107,65 km2
Jumlah			4.828,58

Sumber :Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

3. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Visi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 :

“Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui Harmonisasi dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Prorakyat, Budaya Lokal dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan”

Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing.
- b. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Dan Berwawasan Lingkungan;
- c. Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat.
- d. Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi Pemanfaatan Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal;
- e. Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur Berbasis Iptek;
- f. Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan Kreatifitas;
- g. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Pusat Keunggulan Dan Daya Saing Di Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan Transparan.
- i. Mengembangkan Agroindustri Pertanian.

B. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

1. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung.

“ Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Tidung adalah: “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil. ”

Dalam Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis Operasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung, susunan organisasinya sebagai berikut :

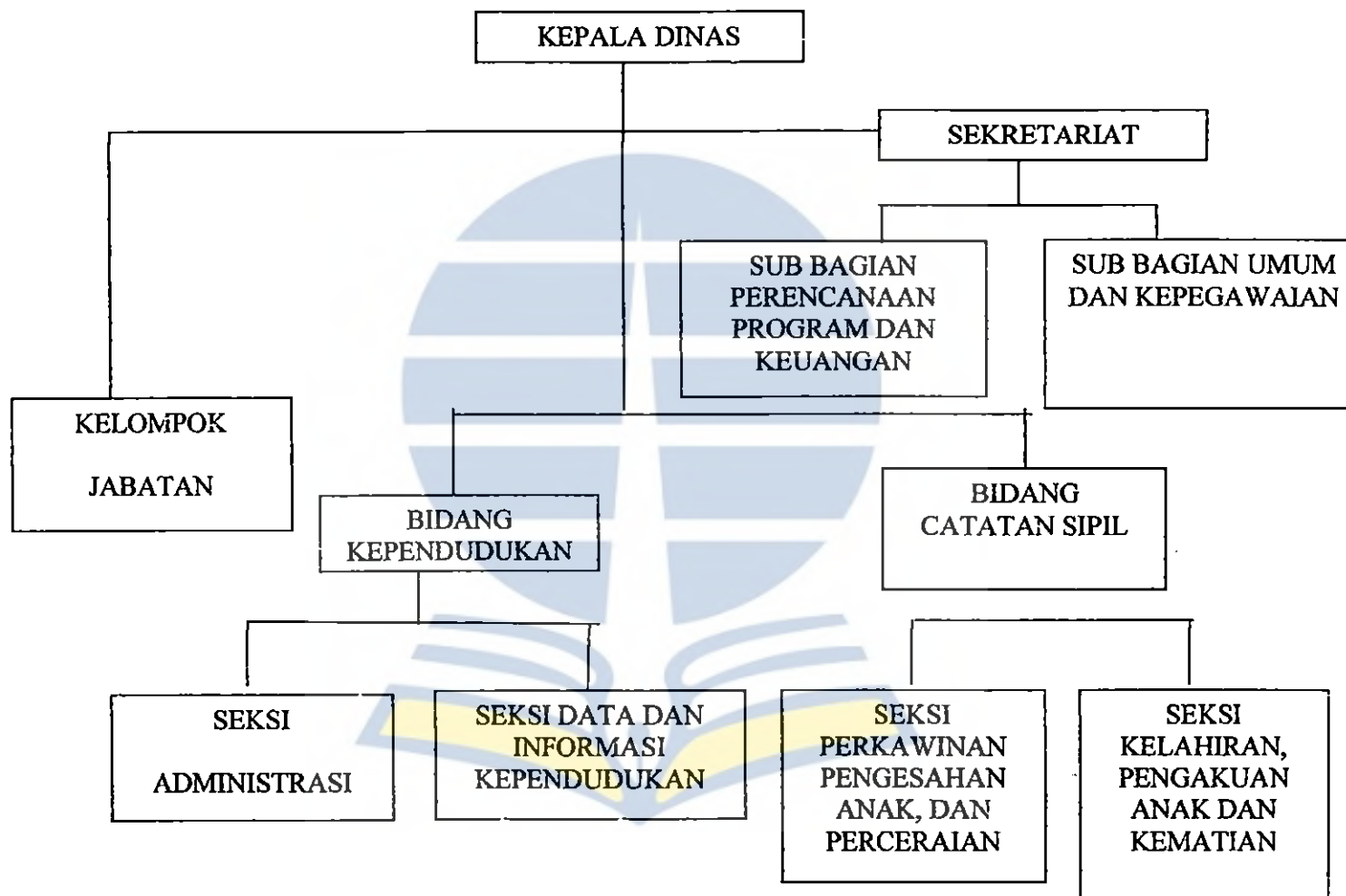
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang

- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
- c. Bidang Pencatatan Sipil
 - 1) Seksi Perkawinan, Pengesahan anak dan perceraian
 - 2) Seksi Kelahiran, Pengakuan anak dan Kematian
- d. Bidang Kependudukan
 - 1) Seksi Administrasi Kependudukan
 - 2) Seksi Data dan Informasi Kependudukan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.



Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung (2016).

2. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 19 orang. Berikut rincian pegawai menurut pangkat golongan dan formasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 4.3 Data Pangkat / Golongan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2015

No	Pangkat Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tk. I, IV/b	1
2.	Pembina, IV/a	1
3.	Penata Tk.1, III/d	2
4.	Penata, III/c	5
5.	Penata Muda Tk. I, III/b	2
6.	Penata Muda, III/a	1
7.	Pengatur Tk. I II/d	5
8.	Pengatur, II/c	1
9.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	0
10.	Pengatur Muda, II/a	1
Jumlah Pegawai		19

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung (2016)

Tabel 4.4 Data Formasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2015.

No.	Uraian	Jumlah	Pendidikan
1.	Kepala Dinas	1	S.2
2.	Sekretaris	1	SMA
3.	Kabid Kependudukan	1	SMA
4.	Kabid Pencatatan Sipil	1	SMA
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	S.1
6.	Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan	1	S.1
7.	Kasi Administrasi Kependudukan	1	S.1
8.	Kasi Data dan Informasi Kependudukan	1	S.1
9.	Kasi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian	1	S.1
10.	Kasi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian	1	S.1
11.	Staf Sekretariat 4 (orang)	1	SMA
		2	D.III
		1	SMK
12.	Staf Kependudukan (3 orang)	2	S.1
		1	D.III
13.	Staf Pencatatan Sipil	2	D.III
	Total	19	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung (2016)

3. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Visi dan Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk dapat mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya, Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung memiliki visi dan misi yaitu:

1) Visi

Setiap organisasi harus selalu mempunyai pandangan ke depan agar dalam bekerja tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta proaktif. Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu visi bersifat menantang mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, visi organisasi harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam memberikan dukungan yang prima, rumusan visi diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian visi menggambarkan sesuatu keadaan harapan di masa mendatang, dengan memperhatikan serta mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang kompleks dan aktual yang akan dihadapi. Visi yang ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah :

“Prima dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis IT menuju data kependudukan yang tertib, akurat dan berkualitas”.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2015 – 2019 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan Pemerintah dan masyarakat, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013.

Prima dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ialah suatu kegiatan dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung berperan sebagai *stelsel* aktif untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Berbasis teknologi diharapkan dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi penyelenggaraan administrasi kependudukan mampu berjalan dengan mudah dan cepat. Adapun yang dimaksud dengan “ Tertib “ adalah suatu kegiatan yang tata urutannya jelas, tegas dan berkesinambungan sesuai dengan kaidah – kaidah yang berlaku. Tertib yang diharapkan meliputi persyaratan, penggunaan / pemakaian dan kepemilikan serta pelaksanaannya dari dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Kemudian “ Akurat “ adalah suatu data atau Dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya. Akuratnya suatu dokumen Kependudukan, sangat penting di era sekarang ini karena persebaran penduduk atau mobilitas penduduk dan juga pengaruh global akan membawa dampak terhadap Administrasi Kependudukan. Selanjutnya “ Berkualitas “ adalah hasil pelayanan cepat, tepat dalam proses penyelesaiannya.

Pelayanan prima ini apabila terlaksana dengan baik merupakan prestasi kinerja aparat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi sekarang ini aparat pelaksana pelayanan dituntut untuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Untuk mewujudkan tercapainya visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas.

2) Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai visi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik melalui pernyataan misi diharapkan agar seluruh program dan institusi yang berkepentingan mempunyai acuan yang jelas terhadap hasil yang diharapkan dimasa mendatang. Misi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan
- b) Meningkatkan Kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SLAK);
- d) Konsisten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan tertib administrasi sesuai kaidah yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan

Untuk mewujudkan tercapainya visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Dari teori Balanced Scorecard sebagai alat menterjemahkan dari visi misi tersebut dapat di gunakan dengan penerapan visi misi yang baik bagi kinerja pada SKPD. Penerapan misi itu sendiri dalam berfokus pada kualitas layanan terhadap masyarakat. dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga semua program yang disusun dalam perencanaan anggaran berfokus pada peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3) Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a) Memberikan pelayanan prima yang seefektif dan seefisien mungkin dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Tana Tidung agar tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan jaringan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di tingkat kecamatan;
- c) Mengikutsertakan masyarakat dalam mensosialisasikan masalah tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- d) Memberikan kesempatan yang luas untuk aparatur dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi.

Dengan menggunakan teori Balance Scorecard sebagai sistem manajemen strategis dilakukan dengan menghubungkan antara terjemahan visi misi dengan tujuan dan sasaran strategis sehinggakan ukuran kinerja yang satu dapat mempengaruhi ukuran kinerja yang lain.

C. Hasil dan Pembahasan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tana Tidung telah menerapkan proses penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja sejak beberapa tahun terakhir. Secara operasional, penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Peremendagri No. 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam proses penyusunan anggaran daerah dengan menggunakan pendekatan kinerja. Dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan ditetapkannya Rancangan APBD menjadi APBD, terdiri dari beberapa tahapan proses kegiatan yang saling terkait.

a. Daya serap anggaran di Kabupaten Tana Tidung.

- 1) Proses Serangkaian tahap proses penyusunan anggaran berdasarkan jadwal sesuai Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi atas Permendagri No 13 Tahun 2006 dapat disusun dalam bentuk tabel. Dengan telah disosialisasikannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada kuartalan ketiga tahun 2006 lalu

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung merespon positif dengan segera mengimplementasikan aturan tersebut. Implementasi diwujudkan mulai tahun anggaran 2007, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung baru terbentuk dan mulai menggunakan bentuk anggaran baru yaitu anggaran surplus atau defisit yang menekankan pada pendekatan kinerja dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ada yang dikeluarkan pemerintah pusat.

- 2) Proses penyusunan anggaran selanjutnya adalah membuat Kebijakan Umum Anggaran, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tana Tidung disusun oleh Pemerintah Daerah, kemudian dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Tana Tidung. Setelah penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tana Tidung selesai dilakukan dan telah ada kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Tana Tidung yang dituangkan dalam nota kesepakatan.
- 3) Tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas APBD. Prioritas APBD diperlukan guna mengatasi berbagai kendala, tantangan dan masalah yang timbul serta untuk dapat memperlancar pencapaian Kebijakan Umum APBD. Dengan telah selesainya penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tana Tidung dan prioritas APBD Kabupaten Tana Tidung, Bupati atau Kepala Daerah menertibkan surat edaran (SE Bupati) untuk kepala unit kerja agar menyiapkan rancangan anggarannya.
- 4) Setelah unit kerja selesai melakukan penyusunan RKA-SKPD, selanjutnya RKA-SKPD tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi. Selanjutnya hasil evaluasi

rancangan yang diusulkan oleh setiap unit kerja dalam RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan APBD.

- 5) Setelah dilakukan perbaikan atau revisi atas evaluasi oleh provinsi terhadap RAPBD Kabupaten Tana Tidung, maka dokumen akan disahkan atau disetujui oleh DPRD.
- 6) Pengesahan atau penetapan dari DPRD Kabupaten Tana Tidung menandakan bahwa RAPBD berubah menjadi dokumen APBD, sehingga APBD dapat dicairkan atau direalisasikan sesuai dengan kebutuhan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung maupun pembangunan daerah dalam sektor publik. Jika APBD sudah disetujui, maka anggaran yang diajukan SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung bisa segera dialokasikan. Berikut ini akan disampaikan uraian dan gambaran mengenai kinerja beserta evaluasinya kegiatan penyusunan anggaran di Dinas Capil dan Kependudukan Kabupaten Tana Tidung. Data-data diperoleh diantaranya melalui teknik wawancara dengan pelaku penyusun anggaran yang masuk dalam Tim Anggaran dan juga dari dokumen-dokumen pendukungnya. Evaluasi akan dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut :

b. Proses Perencanaan Anggaran

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- 1) Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004.
- 2) Jadwal proses penyusunan anggaran di Dinas Capil dan Kependudukan Kabupaten Tana Tidung, disusun oleh Tim Penyusun Anggaran dengan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Jadwal tersebut berisi serangkaian kegiatan dan waktu mengenai kapan suatu tahap kegiatan akan dilaksanakan. Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 telah mengatur tahap-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan beserta jadwal waktu mengenai kapan tahap kegiatan harus dilaksanakan dalam suatu proses penyusunan APBD. Berdasarkan wawancara dengan ibu US, Sekretaris di Dinas Capil dan kependudukan.

“Dalam penyusunan anggaran di capil, kita tidak boleh lewat waktu yang dimintakan pemda, dan selengkap mungkin kita susun kebutuhan kita, soalnya kalo kita lambat bisa-bisa usulan kita ditinggal dan yang diturunkan nanti tidak sesuai dengan yang kita minta”

- 3) Kepatuhan terhadap jadwal yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas APBD yang dihasilkan. Hal ini terkait dengan jumlah waktu minimal yang dibutuhkan dalam melakukan suatu tahap kegiatan dalam proses penyusunan anggaran. Semakin pendek atau sedikit waktu yang diberikan dalam suatu tahapan kegiatan akan mengakibatkan pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang tergesa-gesa sehingga akan menghasilkan suatu *output* yang kurang baik. Disamping itu, karena proses penyusunan anggaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan, maka keterlambatan dapat berakibat pada pengunduran jadwal tahap yang lainnya. Berikut ini merupakan perbandingan jadwal dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan jadwal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, beserta realisasinya. Secara umum, realisasi jadwal maupun jumlah waktu minimal yang dibutuhkan belum sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, baik menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 maupun menurut jadwal yang dibuat oleh Bappeda. Apabila diperbandingkan antara realisasi dengan jadwal yang dibuat oleh TAPD, pelaksanaan kegiatan juga banyak mengalami keterlambatan. Kegiatan penyusunan kebijakan APBD yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli mundur sampai bulan September. Selanjutnya
- 4) proses penyusunan Prioritas APBD juga mengalami penundaan dari jadwal yang ditentukan. Terbatasnya waktu penyusunan RKA-SKPD berakibat pada penyusunan RKA-SKPD dikerjakan dengan tergesa-gesa

dan kurang teliti baik menyangkut indikator kinerja maupun jumlah anggaran yang diusulkan dalam RKA-SKPD. RKA-SKPD yang belum sempurna sudah harus diajukan ke TAPD karena jadwal verifikasi atau penelitian yang sudah dekat.

- 5) Kurang sempurnanya RKA-SKPD yang diajukan mengakibatkan proses verifikasi oleh TAPD harus mengalami banyak revisi dan perbaikan yang terkadang dilakukan sampai berulang kali. Hal ini menyebabkan pekerjaan yang dilakukan, baik oleh unit kerja maupun oleh TAPD tidak efektif dan efisien.
- 6) Pengajuan Rancangan APBD kepada DPRD oleh pihak eksekutif seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober. Akan tetapi pengajuan Rancangan APBD mengalami keterlambatan. Sebagai hasilnya, realisasi penetapan RAPBD menjadi APBD untuk APBD TA untuk tahun berikutnya mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil wawancara, dengan US, Kadis Disdukcapil:

“Keterlambatan penetapan APBD tersebut dikarenakan berbagai macam sebab permasalahan dan hambatan. Sehingga akan mengakibatkan mundurnya penetapan APBD dari jadwal yang ditentukan berakibat pada pelaksanaan kegiatan pada tingkat unit kerja”

Setelah APBD ditetapkan, masih dilakukan penjabaran APBD, yaitu pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh unit kerja dengan mendasarkan pada RKA-SKPD yang sebelumnya sudah dibuat. Dengan penetapan APBD yang terlambat, akan berdampak bagi unit kerja didalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan yang paling merasakan dampaknya adalah

terutama untuk kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan proses pelelangan, dimana proses pelelangan biasanya memakan waktu yang lebih lama dibanding dengan proses pengadaan barang atau jasa melalui penunjukan atau pemilihan secara langsung.

Hasil Wawancara dengan RA kasi Data Kepndudukan sebagai berikut:

"Kami tidak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal walaupun dana yang kami ajukan sangatlah besar di karenakan penetapan anggaran tidak sesuai jadwal dengan jadwal ini merupakan faktor yang sangat besar mengapa daya serap anggaran tidak maksimal walau dana yang di ajukan sangatlah besar"

Dari wawancara dapat disimpulkan adapun kegiatan pada Disdukcapil yaitu Pemutahiran data yang dilakukan 2 tahun sekali sangatlah berpengaruh besar karna anggaran dana yang digunakan sangatlah besar tetapi tidak dapat maksimal dikarenakan keterlambatan anggaran .pada kegiatan pemutahiran kami selalu membawa para kepala RT (Rukun Tetangga) agar dapat bersama" memutahirkan data setiap 2 tahun dan setelah itu kami membawa para RT mengambil sampel perbandingan dimana yang telah ditentukan daerah yang di anggap pantas sebagai kota percontohan seperti kota Balikpapan

Penganggaran sangatlah penting dalam suatu kegiatan walaupun yang lakukan sudah maksimal dalam perencanaan tetapi tetap keputusan terakhir pada Tim anggaran sebenarnya ingin melakukan suatu pekerjaan secara maksimal dan didukung oleh dana yang memadai. Hasil Wawancara dengan NZ Sekretaris Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

“Semua kegiatan dalam pemerintahan yang didasari oleh hukum dan di lakukan pendanaan yang matang maka akan menghasilkan kegiatan program yang baik dalam pelaksanaan pemerintah”

Dalam pasal 83 Permendagri No. 13 tahun 2006 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan proses awal dalam tahap penyusunan APBD, karena dokumen ini akan dijadikan dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun anggarannya yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusunan Raperda APBD. Mekanisme secara formal yang ada saat ini yaitu melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan melalui survey terhadap masyarakat.

c. Pelaksanaan Anggaran

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus :

- a) Menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan;
- b) Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro;
- c) Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya;
- d) Menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

Setelah rancangan Kebijakan Umum APBD selesai dibuat oleh Pemerintah Daerah, lalu diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama dan mendapatkan kesepakatan. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah melakukan presentasi terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibuatnya, sementara DPRD hanya mendengarkan dan atau selanjutnya mengkritisnya. Menurut pendapat penulis, akan lebih bagus jika DPRD juga membuat rancangan Kebijakan Umum APBD. Sehingga dengan adanya dua versi rancangan Kebijakan Umum APBD yaitu rancangan versi Pemerintah Daerah dan rancangan versi DPRD yang masing-masing dipresentasikan, akan diketahui kebijakan-kebijakan yang terbaik dari kedua versi kebijakan tersebut, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu juga akan lebih baik lagi jika ada perwakilan dari masing-masing SKPD yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga nanti realisasi anggaran di masing-masing SKPD besarnya sama dengan besaran program yang diusulkan. Hasil Wawancara

dengan NZ Sekretaris Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut

“Seringkali kami kecewa, karena anggaran yang kami usulkan dapatnya selalu lebih kecil dari yang diusulkan seringkali hal ini menjadi hambatan dalam menjalankan program-program yang sudah disusun bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil” hal ini disampaikan oleh NZ, Sekretaris Disdukcapil .

Sehingga mempertemukan antara tim penyusun anggaran di tingkat Pemerintah Daerah, DPRD, dan SKPD dipandang sangat perlu. Sehingga dengan demikian akan terjadi suatu kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, DPRD, SKPD-SKPD di Kabupaten mengenai Kebijakan Umum APBD yang memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dari setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Apabila dilihat dari jadwal waktu yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD untuk TA 2015 s/d TA 2016 selalu mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Kondisi paling buruk terjadi pada penyusunan Kebijakan Umum APBD untuk TA 2015-2016, melampaui waktu penetapan APBD yang telah direncanakan.

Dari fase inilah kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimulai. Penyusunan anggaran unit kerja dilaksanakan setelah adanya Surat Edaran Bupati untuk menyiapkan rencana anggaran oleh unit kerja. Anggaran yang diusulkan oleh unit kerja dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), yaitu berupa form yang digunakan oleh TAPD dan unit kerja dalam menyiapkan penyusunan

rancangan APBD. Menurut Pasal 89 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Surat Edaran tersebut memuat antara lain: Prioritas Plafon Anggaran yang dialokasikan untuk setiap program SKPD, Kebijakan Umum APBD, kode rekening APBD, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan Format RKA-SKPD. Dalam mempersiapkan penerapan anggaran dengan pendekatan kinerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masing-masing unit kerja pada awal bulan Oktober tahun sebelumnya. Pelatihan dan sosialisasi tersebut hanya diperuntukan terbatas bagi antara lain: Kepala-kepala unit kerja, pejabat setingkat Ka Sub dinas, Ka Subbag Keuangan, dan Pemegang Kas. Materi yang diberikan dalam pelatihan yaitu mengenai anggaran berbasis kinerja termasuk petunjuk dan cara pengisian RKA-SKPD. Tetapi sayangnya pelatihan semacam ini, sampai saat ini baru dilakukan satu kali dan pesertanya juga sangat terbatas, sehingga sebenarnya pelatihan dan sosialisasi tersebut masih kurang dan masih diperlukan. Sedangkan saat ini yang bisa dilakukan dalam persiapan penyusunan usulan anggaran tahunan unit kerja adalah Bappeda mengundang setiap unit kerja untuk diberikan bimbingan mengenai tatacara penyusunan usulan anggaran unit kerja. Hasil wawancara dengan DS staf Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai berikut:

“Dulu waktu pertama kali dikeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, kami melakukan sosialisasi secara komprehensif. Adapun sekarang sosialisasi hanya diberikan tentang penyusunan RKA-SKPD saja.” (DS Staf Keuangan Disdukcapil).

Dari hasil penelitian, apabila dilihat dari usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh unit kerja, ternyata masih banyak unit kerja yang mengajukan

usulan kegiatan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kreatifitas dari unit-unit kerja dalam mencari rencana kegiatan yang mendukung tupoksi unit kerja yang dapat dilaksanakan untuk tahun yang akan datang. Disamping itu, masih banyak pula dijumpai unit kerja yang mengajukan usulan kegiatan yang hanya dibuat dengan seadanya seperti tidak sesuai dengan tupoksi, cenderung memperbanyak kegiatan, anggaran yang diajukan melebihi standar yang ditentukan dan penentuan indikator kinerja yang tidak cermat atau tepat. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu penyusunan anggaran unit kerja yang hanya diberikan waktu sekitar dua minggu sehingga unit kerja kurang siap dalam melaksanakan penyusunan usulan anggarannya.

Rendahnya pemahaman unit kerja khususnya personel yang ada terhadap substansi anggaran kinerja dan juga masih adanya pemikiran atau *mind set* bahwa semakin besar kegiatan yang disetujui maka semakin besar hasil yang akan diperoleh, juga merupakan faktor penyebab lainnya. Hasil Wawancara dengan IK kasubag Kependudukan dan data sebagai berikut

“Untuk belanja-belanja yang sifatnya rutin, seperti pengadaan ATK, pasti dari tahun ke tahun akan sama. Mungkin belanja-belanja yang Anda (peneliti) lihat adalah belanja langsung yang kebetulan dari tahun ke tahun sama, seperti perbaikan belanja pengadaan Plangko KTP, KK, Akte Kelahiran dan Perkawinan. Karena menurut pengalaman, setiap tahun pasti ada masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan KTP.”

Sebagai tambahan, untuk membantu penyusunan anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar khususnya dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, semenjak TA 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung telah menggunakan Sistem Informasi Daerah (SIMDA). Simda

merupakan suatu sistem yang digunakan dalam sistem keuangan daerah, dimana sistem ini akan membantu pada saat penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Namun, sistem ini belum terhubung kepada setiap instansi yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Pada praktek penyusunan anggaran unit kerja, masing-masing unit kerja dapat menyusun anggaran dengan langsung mengisi form RKASKPD yang terdapat pada layar komputer, sehingga sebenarnya dengan sistem ini penyusunan RKA-SKPD akan semakin mudah dan cepat, karena komputer dapat langsung melakukan perhitungan secara otomatis dan hasil penyusunan anggaran unit kerja yang sudah selesai dapat langsung dikirim kepada TAPD secara tetapi belum secara online. Transfer data antar instansi pemerintah masih menggunakan *flashdisk*. Hasil wawancara dengan AG Bendahara pengeluaran pembantu sebagai berikut:

“Kami (Pemkab) sudah memiliki SIMDA guna kelancaran pembuatan RKA-SKPD. Adapun dalam prakteknya belum bisa online, sehingga dalam pertukaran data masih menggunakan *flashdisk*.” (Bendahara Pengeluaran Pembantu).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelatihan penggunaan sistem ini hanya dilakukan satu kali saja pada waktu pertama kali pengadaan peralatan tersebut. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengadaan, dan itupun hanya terbatas pada dua orang personel untuk tiap unit kerja. Sehingga dengan keadaan ini, untuk mengoptimalkan penggunaan sistem yang ada seharusnya masing-masing unit kerja memberdayakan personel yang ikut dalam pelatihan tersebut dengan mengajarkan ilmunya kepada personel atau staf lainnya.

Verifikasi usulan RKA-SKPD dilaksanakan pada akhir bulan Oktober. Verifikasi dilaksanakan oleh tim teknis TAPD yang dibagi dalam tiga kelompok TAPD dengan waktu selama sekitar dua minggu. TAPD mempunyai tugas mengevaluasi setiap usulan RKA-SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Tana Tidung. Verifikasi harus sudah diselesaikan selama dua minggu atau masih pada bulan oktober agar pengajuan Rancangan APBD kepada DPRD dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu sekitar bulan November.

Verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan secara beturut-turut sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh DP2KAD dan bertempat di kantor DP2KAD Kabupaten Tana Tidung. Jadwal verifikasi biasanya dikirimkan ke masing-masing unit kerja beberapa hari sebelum pelaksanaan verifikasi. Verifikasi yang dilakukan untuk suatu unit kerja biasanya tidak cukup diselesaikan satu kali saja. Hal ini dikarenakan terkadang usulan yang diajukan unit kerja masih terdapat kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki atau direvisi, sehingga unit kerja harus memperbaiki dan diajukan pada kesempatan lain. Namun demikian, setelah verifikasi yang pertama, verifikasi (atau lebih tepatnya disebut konsultasi) selanjutnya dapat langsung dilakukan secara personal ke anggota tim teknis TAPD di ruang kerjanya. Kemampuan dan kesiapan unit kerja dalam membuat atau menyusun RKA-SKPD juga akan sangat mempengaruhi frekuensi konsultasi. Ada unit kerja yang harus bolak-balik melakukan konsultasi dengan anggota tim teknis karena RKA-SKPD nya selalu salah, tetapi ada juga yang hanya beberapa kali melakukan konsultasi sudah dianggap benar oleh tim teknis. Hasil wawancara dengan NZ sekretaris Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

“Memang biasanya terdapat ketidak sepahaman antar anggota TAPD, tetapi setelah ada rekonsiliasi, hal tersebut tidak menjadi masalah.”

Pembahasan RKA-SKPD unit kerja dengan tim teknis terkadang juga terjadi masalah yang ditimbulkan oleh ketidaksepahaman sesama anggota tim teknis sendiri. Ada anggota tim teknis yang pada waktu dilakukan konsultasi secara personal memberikan arahan atau koreksian tertentu dan segera dilaksanakan oleh unit kerja tetapi setelah hasil RKA-SKPD koreksian diajukan lagi ternyata disalahkan oleh anggota tim teknis lainnya. Sebagai akibatnya RKA-SKPD harus mengalami perubahan lagi yang berdampak pada penambahan waktu dan biaya. Kejadian ini menunjukkan bahwa dalam tim teknis sendiri masih terdapat pemahaman yang berbeda dalam melakukan verifikasi terhadap RKA-SKPD. Sehingga hal ini mengindikasikan perlu adanya panduan dan aturan-aturan yang jelas bagi mereka dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya penajaman usulan anggaran unit kerja, TAPD diberi kebebasan untuk melakukan pencoretan terhadap suatu kegiatan dan pemotongan usulan anggaran yang diajukan oleh suatu unit kerja agar sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Setelah serangkaian verifikasi yang dilakukan oleh tim teknis terhadap usulan anggaran dari seluruh unit kerja selesai dilaksanakan, hasil verifikasi dibahas lagi dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota TAPD, untuk mempersiapkan Rancangan APBD. Dalam rapat tersebut, akan dibahas lagi pematangan RKA-SKPD hasil verifikasi. Dalam kesempatan itu, Bupati mempunyai peran dan otorisasi yang sangat besar dalam menentukan maupun merubah besarnya alokasi anggaran belanja untuk suatu program atau kegiatan.

Dengan adanya peran dan otorisasi yang sangat besar tersebut terkadang berakibat pada hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim teknis justru tidak terpakai.

Hasil Wawancara dengan US Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

“Kegiatan yang tidak terlalu menefektif dan tidak tepat guna maka dari atau pun kepada daerah yaitu Bupati merasa ada hal yang perlu dikoreksi, maka Bupati akan mengembalikan kepada TAPD.”

d. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup ;

- 1) Laporan realisasi anggaran SKPD
- 2) Neraca SKPD
- 3) Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

e. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan

sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Daya serap anggaran yang pada dinas kependudukan hanya mencapai rata-rata 84 % periode 2010 -2014. Hal ini dikarenakan salah satunya proses penetapan anggaran yang terlambat sehingga waktu yang dibutuhkan dalam realisasi anggaran menjadi terbatas.
2. Proses Perencanaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dilakukan berdasarkan intruksi dari Pemda secara keseluruhan, dimulai dari perencanaan SKPD, evaluasi tim TAPD dan penetapan anggaran oleh Pemda. Proses penyusunan anggaran yang tidak tepat mengakibatkan program kegiatan pada dinas kependudukan dan Pencatatan sipil tidak optimal dalam melakukan kegiatan untuk keseluruhan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dilakukan setelah ada surat edaran dari bupati setelah APBD disetujui, dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, diantaranya adalah keterbatasan SDM yang ada, serta keterbatasan anggaran secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan dana yang biasanya turun lebih kecil jumlahnya daripada dana yang diajukan.
4. Adapun pendekatan penganggaran yang di gunakan adalah Adapun tahapan/proses perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan pekerjaan perencanaan dari pimpinan kepada bagian perencanaan
- b. Pemberian dukungan berupa kebijakan dan sumber daya.
- c. Penentuan tujuan perencanaan .
- d. Penyusunan rancangan rencana kerja didasarkan pada *strategic action plan(preparation of draft business plans)*.
- e. Mengumpulkan data-data berupa usulan kebutuhan dan permasalahan setiap unit kerja atau instansi .
- f. Menyajikan berbagai pilihan kegiatan.
- g. Menilai alternatif-alternatif tindakan yang ditawarkan pada tahap sebelumnya dengan memberikan penilaian dan membuat peringkat prioritas kegiatan..
- h. Memilih alternative dan menyusun kegiatan kedalam dokumen RKA dan RBA dan selanjutnya mengikuti mekanisme pengesahan APBD Kab. Tana Tidung .

Adapun pendekatan penganggaran yang digunakan adalah gabungan antar *Performance Based Budgeting* dan *Zero Based Budgeting*, dimana penentuan prioritas kegiatan dan penganggaran memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran/hasil berupa daya ungkit terhadap pencapaian SPM, dan penentuan anggaran didasarkan apada kebutuhan saat ini melalui usulan unit dan instansi sehingga anggaran yang tidak relevan untuk mendukung tujuan organisasi tidak dimunculkan dalam struktur anggaran.

5. Kinerja pelayan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Tidung sebagian telah menunjukkan hasil yang baik, namun bila ditinjau dari berbagai perspektif *balance scorecard* menunjukkan kinerja pelayanan publik yang belum seimbang antara pencapaian kinerja pelayanan dalam perspektif keuangan, *costumer*, pertumbuhan dan pembelajaran, serta proses bisnis internal. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini perencanaan belum berorientasi secara seimbang terhadap pencapaian kinerja pelayanan dalam berbagai perspektif. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan public secara simultan dan berorientasi jangka panjang maka kinerja pelayanan yang merupakan aspek pelayanan public maka diperlukan strategi perencanaan yang komprehensif untuk menunjang pencapaian kinerja pelayanan dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, *costumer*, proses bisnis internal, dan keuangan secara seimbang.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi sasaran/mutu target tahunan (SPM) serta hasil evaluasi pencapaiannya pada setiap awal tahun anggaran.
2. Untuk meningkatkan kompetensi SDM, termasuk kompetensi bidang perencanaan perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat formal maupun *on the job training*.
3. Mengatasi kendala keterbatasan anggaran dengan memprioritaskan kecukupan biaya operasional pelayanan, melakukan pemantauan pada efektivitas implementasi kegiatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan diverifikasi produk layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Menbuat jadwal perencanaan yang memungkinkan optimalisasi dan evektifitas kegiatan perencanaan.
5. Mengembangkan system informasi yang tidak hanya sebatas *billing system*, dan dioptimalkan pengoperasiannya sampai pada tingkatan manajemen sehingga mampu mengatasi kendala distorsi informasi.
6. Strategi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Tidung perlu lebih komprehensif dengan memperhatikan pencapaian kinerja dari empat perspektif yaitu, *Pelayanan yang basis kinerja*, program penrtipan anggaran yng berbasis kinerja, pertumbuhan dan pembelajaran untuk semua staf, serta keuangan secara seimbang untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan memiliki dampak strategis jangka panjang renja dan renstras.
7. Membuat kebijakan internal menyangkut ketentuan penyusunan perncaanaan anggaran penentuan unit *revenue center* dan unit pendukung pelayanan, serta perlu dilakukan upaya pendekatan kepada *shakeholder* sehingga kebijakan berupa Peraturan Bupati yang mengatur *Fleksibilitas Disdukcapil* sebagai pelayanan masyarakat dan sebagai yang menunjang saran pemerintah dalam pemerataan data kependudukan efektifitas anggaran dapat diutamakan .
8. Penelitian ini hanya mencakup penganggaran anggaran saja. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian dapat diperluas dengan mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Sehingga dari hasil evaluasi penyusunan, pelaksanaan danpertanggungjawaban, akan didapat gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah.

9. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode survey untuk membuktikan keefektifan implezmentasi dan melengkapi hasil temuan dalam penelitian ini.
10. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan di daerah lain dengan jangkauan pengamatan yang lebih luas dan panjang.

Fungsi perencanaan anggaran daerah hendaknya sudah dilakukan oleh para anggota DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat (needs assessment) hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 149 sebagaimana fungsi penganggaran pada Kabupaten / Kota diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
- b. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
- c. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
- d. Perubahan APBD kabupaten/kota; dan
- e. Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, Sadat S dan Nasir. Moch.(2002). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dengan Senjangan Anggaran, Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-5*. Semarang.
- Bastian. Indra. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Bungin,Burhan,(2007).*Peneliti Kualitatif ::Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* .Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.
- Creswell.J.W.,(2009).*Research Design,Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif dan Mixed*,Penterjemah:Achmad fawaid
- Deddi Nordiawan. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta.
- Husein Umar.(2003). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Indra Bastian.(2006). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Suatu Pengantar*. Erlangga : Jakarta.
- Indriantoro. Nur dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Jonathan Sarwono. (2006). *Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14*. Andi Ofset : Yogyakarta.
- Kaplan, Robert S. dan David P. Norton, (2000). *“Balanced Scorecard: Menerapkan strategi menjadi aksi”*. Erlangga. Jakarta.
- Kusmayadi dan Sugiarto, Endar. (2000), *Metode Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*,Jakarta: PT Gramedia Pusakata Utama
- Kurniawan (2009) melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV PRIANGAN*

- Mahmudi (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- M. Nafarin. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat : Jakarta.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta
- Mulyadi (2009;141) Tentang *bahwa BSC dapat diterapkan secara efektif di organisasi sector public dan organisasi nirbala*.
- Munjawa, Killian M, Innoncet Chirisa and Farai S. Madzivanzira, 2008. *Participatory Budgeting and Participatory planning : Defining The Theoretical and practical Emphases in The two Approaches*. *Local Governance and Development Journal Volume 2 Number 2: p, 40-64*.
- Niven. Paul R.(2003) *Balanced Scorecard Step By Step For Government and Non Profit Agencies*. John Wiley & Sons.Inc., Canada.
- Nordiawan,Iswahyudi dan Maulidah.(2007) .Tentang *jenis-jenis anggaran*
- Sony Yuwono. Agus Indra Jaya. Hariyandi . (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Sugiyono.(2007). *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2011). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung .Alfabeta.
- Syakhroza, A.(2002). *The Effect of Politics on Budgetary Control : A study of Fertilizer Industry in Indonesia*. *International Journal of Business Studies*, Vol 10, December 2002: 75-96
- Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan*. Agung Media : Jakarta.
- Umar .2003;168-169 . Tentang *keempat perspektif tersebut ditinjau dalam 2 (dua) kelompok yaitu tinjauan dari sisi internal dan eksternal organisasi, serta dari sisi proses dan orang*

Zaynalian, Morteza. 2010. *Desaining a Multi-Purpose Optimization Model For Budget Allocation Using a Hierarchical Approach*. *Eurupean Journal Of Economics, Finance and Admnistrative Science*.

Visi ,misi Kabupaten tana tidung Tahun 2010-1015

Visi misi Kabupaten tana tidung tahun 2016-2021

Visi misi Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 -2021

Tesis :

AtikNorhayati,2011, *Proses Perencanaan dan penganggaran dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public (Studi pada badan layanan umum daerah RSUD Nganjuk)*,Malang:Universitas Brawijaya

Herawati (2011) melakukan penelitian dengan judul *Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi*

Julianto (2009) meneliti *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD di Pemkab Tebing Tinggi*.

Muda (2005) melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Skretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan*

Nina. (2009). *Tentang meneliti Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah*

Putra (2010), *Tentang meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun*.

Yusriati (2008), *Tentang meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja SKPD di Pemkab Mandailing Natal*.

Internet:

<http://rsenoaji.blogspot.co.id/2011/01/emplementasi-konsep-value-formoney.html>
diposkan Sabtu, Januari 1, 2011 didownload tgl 24 may 2016. 10.20

<http://tanatidungkab.go.id/web/index.php>

Peraturan Undang – Undang :

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang - Undang No. 32 tentang *Pemerintahan daerah*

Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*

Peraturan Pemerintah :

Peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2015 Pasal 1 Tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013*.

Data APBD Realisasi Anggaran Disdukcapil dalam 5 Tahun 2010 dan 2015, simda keuangan 2015

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung*

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Peremendagri No. 59 Tahun 2007, tentang *menyatakan bahwa dalam proses penyusunan anggaran daerah dengan menggunakan pendekatan kinerja*

Pasal 83 Permendagri No. 13 tahun 2006 disebutkan *bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun*

LAMPIRAN 1 : Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)

Instrumen Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrumen penelitian berupa Pedoman wawancara, karena dalam proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber/Informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses Program (Pemrograman anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Narasumber/Informan adalah pemberi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dalam penelitian kualitatif.

INTRUMEN PENELITIAN :

PEDOMAN WAWANCARA

1. Evaluasi terhadap jadwal penyusunan anggaran.
2. Evaluasi proses penyusunan Kebijakan Umum APBD.
3. Evaluasi proses penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran dana Sementara.
4. Evaluasi proses penyusunan RKA-SKPD tahap-tahap dalam praktek penyusunan anggaran dengan pendekatan
5. Evaluasi proses verifikasi RKA-SKPD.
6. Evaluasi proses penetapan APBD.

Lampiran 2 Wawancara awal dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Transkrip Wawancara : Jumat, Tanggal 29 April 2016 Pukul 09.30 – 10.01 di

Disdukcapil.

Pembicara	Transkrip Data
Peneliti	Bagaimana Menurut ibu tentang kegiatan administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil khususnya di bagian keuangan
US, Kepala Disdukcapil (Hj.Umi Suhartini, S.Pd, M.H.)	Kegiatan administrasi pencatatan sipil, pada dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2006 yang di ubah menjadi UU no 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan mulai dari persyaratan pengajuan akta-akta pencatatan sipil yang tentunya melibatkan penyelenggara administrasi pencatatan sipil berjenjang mulai dari tingkat RT, desa, camat hingga pada kami, selaku kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang artinya sangatlah memerlukan harmonisasi dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik
Peneliti	Bagaimana Menurut ibu tahapan-tahapan dalam pembuatan DPA yang baik ?
US, Kepala Disdukcapil (Hj.Umi Suhartini, S.Pd, M.H.)	Tahap-tahapan dalam pembuatan DPA - Pejabat pengelolaan Keuangan daerah (PPKD) paling lambat 3 hari kerja setelah perda tentang APBD di Tetapkan lalu menyusun Rancangan DPA-SKPD - Kepala SKPD Menyerahkan Kepada PPKD Paling lama 6 hari kerja. -TAPD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD bersama kepala SKPD Paling lama 15 Hari sejak di tetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Peneliti US, Kadis (Hj.Umi Suhartini, S.Pd, M.H.)	-PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan SEKDA -DPA SKPD yang telah di sahkan di limpahkan kepada kepala SKPD Paling lama 7 Hari kerja. Menurut ibu apa saja yang diperlukan dalam pengajuan program kegiatan disini buk ? Untuk menyusun DPA di perlukan informasi yang akurat dan sinkron yang terkait dengan belanja berdasarkan urusan pemerintah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang dicapai dari program kegiatan. Program dan kegiatan menurut nama program dan kegiatan di SKPD dalam tahun anggaran berkenaan yang telah disepakati dalam KUA dan PPA. Indikatornya meliputi masukan, keluaran dan hasil.
Peneliti US, Kadis (Hj.Umi Suhartini, S.Pd, M.H.)	Bagaimana Menurut pendapat ibu tentang pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu pada DPA? Menurut saya semua program dan kegiatan dalam pemerintah harus mengacu pada dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Sesuai dengan kode rekening yang telah di tetapkan dan disetujui oleh TAPD. Jika tidak akan terjadi temuan-temuan dalam proses pemeriksaan oleh BPK.
Peneliti US, Kadis (Hj.Umi Suhartini, S.Pd, M.H.)	Bagaimana menurut ibu serapan anggaran dalam dua tahun terakhir ini? Realisasi anggaran atau daya serap anggaran dalam dua tahun terakhir ini sangatlah tidak memuaskan pada tahun 2014 sebesar 84,19% dan pada tahun sebesar 80 % jadi menurut saya sangatlah tidak maksimal dan masih banyak lagi mengapa masalah anggaran itu susah diserap, ya pada saat itu masa transisi jabatan bupati defenitif dan bupati pejabat sementara mempunyai pemikiran tentang kegiatan kami khususnya di Disdukcapil sangatlah berbeda, pada hal kami sangatlah penting dalam penertipan pilkada selain itu masyarakat sangatlah memerlukan

	kami dalam pembuatan maupun penerbitan KTP ,KK, Akte kelahiran dan Akte kematian.
Peneliti	Dapatkah ibu menjelaskan masalah realisasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan
US, Kadis (Hj.Umi Suhartini, S.Pd, M.H.)	Apabila diperbandingkan antara realisasi dengan jadwal yang dibuat oleh TAPD, pelaksanaan kegiatan juga banyak mengalami keterlambatan. Kegiatan penyusunan kebijakan APBD yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli mundur sampai bulan September
Peneliti	Baik bu mungkin sekian pak untuk wawancara yang saya tanyakan kepada bapak, mungkin atas waktunya yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih pak, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih mungkin sekian dari saya terima kasih pak?
US, Kadis (Hj.Umi Suhartini, S.Pd, M.H.)	sama – sama ,semoga suksesya.

Lampiran 3 Wawancara awal dengan Sekretaris Daerah

Transkrip Wawancara : Senin, Tanggal 2 May 2016 Pukul 09.30 – 10.01 di
Disdukcapil.

fungsinnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kebijakan. Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah salah satu ukuran kinerja Bagian Umum dan Protokol untuk melihat seberapa besar kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan dan nantinya oleh

masyarakat dapat terpenuhi dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dari pemerintah. Bagian umum dan protokol telah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut sehingga tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa tergantung dari pemerintah



Pembicara	Transkrip Data
Peneliti	Bagaimana menurut bapak masalah otonomi daerah yang berkaitan langsung dengan Disdukcapil
NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. Nurjain, S.E)	Menurut saya, otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah sendiri ,sehingga mereka leluasa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain itu, otonomi daerah mempermudah pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat.
Peneliti	Bagaimana Menurut bapak Tentang Pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada DPA
NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. Nurjain, S.E)	Menurut saya semua yang kita lakukan di dalam suatu dinas dimana pun kita selalu mangacu pada program kerja yang beralih pada program kerja yang telah berbentuk DPA jadi apapun yang kita kerjakan telah berarah dan berselaras,dalam suatu badan hukum dan tata keuangan yang telah di tetapkan.
Peneliti	Bagaimana hasil rapat staf bapak dalam hal perencanaan kegiatan?
NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. Nurjain, S.E)	Hasil rumusan dan usutanya yang ada yaitu rencana kerja anggaran (RKA) dan kegiatan program ini harus di rumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan di lapangan, tetapi ada kendala lainnya dalam pembulatan hasil rapat yang kami lakukan yaitu beberapa pihak saja yang bersuara, selebihnya hanya ngikut saja dikarenakan kurangnya pengalaman dan SDM anggotanya.
Peneliti	Bagaimana menurut anda serapan anggaran dalam dua tahun terakhir ini.?

NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. Nurjain, S.E)	Realisasi anggaran atau daya serap anggaran dalam dua tahun terakhir ini tidak begitu maksimal, pada tahun 2014 sebesar 84,19% dan pada tahun ini sebesar 80% jadi menurut saya daya serap anggaran tidak memuaskan karena anggaran yang ada tidak maksimal dan masih banyak lagi mengapa masalah anggaran itu susah di serap ya pada saat itu ,masa transisi jabatan bupati defenitif dan bupati pejabat sementara mempunyai pemikiran tentang kegiatan kami khususnya di Disdukcapil sangatlah berbeda pada hal kami sangatlah penting dalam penertipan pilkada dan selain itu masyarakat sangatlah memerlukan kami karna dalam KTP ,KK,dan Akte kelahiran dan Akte kematian
Peneliti	Apakah menurut bapak disdukcapil sangatlah mempunyai peran penting dalam program kinerja kabupaten Tana Tidung?
NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. Nurjain, S.E)	Menurut saya setelah di lakukan nya RKA menjadi DPA dan telah di sahkan disdukcapil mempunyai peran penting dalam kesejahteraan rakyat yang berkaitan melalui jika mereka ingin membuat BPJS mereka harus melengkapi persyaratan antara lain KK, KTP oleh karna itu peran disdukcapil sangatlah penting dalam masyarakat pada umum nya dan pada khususnya, masalahnya adalah jika kami menggarkan kegiatan pemutahiran yang di ajukan 4,5M yang di setuju hanya 900 juta jadi bagaimana kami ingin melakukan kegiatan secara maksimal anggaranya saja tidak dapat di setuju dengan maksimal, pada hal masalah dilapangan sangatlah banyak dan seandainya para petinggi bersama-sama turun kelapangan dapat mengetahui masalah ini sangat lah penting.
Peneliti	Bagaimana menurut bapak anggaran yang tidak maksimal?
NZ,Sekretaris Disdukcapil (H. Nurjain, S.E)	Anggaran yang kami dapatkan sangatlah tidak sesuai seringkali kami kecewa, karena anggaran yang kami usulkan..dapatnya selalu lebih kecil dari yang diusulkan. Seringkali hal ini menjadi hambatan dalam menjalankan program-program

Peneliti	yang sudah disusun bagian capil dan kependudukan
NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. Nurjain, S.E)	Apakah APBD pernah terlambat?
Peneliti	keterlambatan yang terjadi dikarenakan berbagai macam sebab. Karena keterlambatan APBD tersebut, berakibat pada pelaksanaan kegiatan pada tingkat unit kerja”
NZ, Sekretaris Disdukcapil (H. Nurjain, S.E)	Baik Pak mungkin sekian pak untuk wawancara yang saya tanyakan kepada bapak, mungkin atas waktunya yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih pak, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih mungkin sekian dari saya terima kasih pak?
	sama – sama

MATRIK SARAN PERBAIKAN TAPM

NAMA : EVI TRIANA DEWI

NIP : 19842304201001210

NIM : 500646592

NO	Penguji/Pembimbing 1 &2	Masukan /Saran	Keterangan
1	Dr.Muhammad Taufiq,DEA	1. Perbaiki Kerangka berpikir sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti.	Sudah pada Bab .II ,hal.39
		2. Apa Konsep sesuai yang di gunakan untuk menjawab permasalahan	Sudah pada hal .2 dan hal .28 value for money dan Balanced Scorecard
		3. Bab. IV Gunakan proses perencanaan dengan penggarana sesuai penggunaan anggaran di jelaskan di gunakan umum	Sudah pada hal.62 s/d 77
		4. Analisa dan pembahasan - Belum Menjawab pertanyaan penelitian seharusnya jelas untuk menjawab serapan anggaran sudah maksimal. - Jelaskan mengapa kinerja internal kinerja pelaksanaan anggaran. - Kesimpulan disesuaikan untuk menjawab penyelesaian penerapan Rekomendasi usulan membahas prinsip anggaran.	Sudah pada bab 4 hal.64 Paragraf Ke 2, Hal.65,70,73 Paragraf Ke 2 hal,76
2	Suciati,M.Sc.,Ph.D	1. Teori yang tidak di jelaskan "misal" Balanced Scorecard ,tidak di cantumkan	Sudah pada bab II hal 29
		2. Pada pendahuluan cukup di sajikan data empiriknya.melalui alasan pemikiran nya dan perumusan masalah.	Sudah pada bab II hal 11 Paragraf Ke 2, Hal.17
		3. Perbaiki Menggunakan pedoman Penulisan TAPM-PR	Sudah Di Akomodir Sesuai Dengan Pedoman TAPM
3	Dr.Meita Istianda ,S.IP.,M.SI	1. Penggunaan Teori di pikirkan ulang	Sudah Pada Hal.29,30
		2. Pada Bab IV jelaskan tentang beberapa konsep dan pengertian perencanaan	Sudah di hal.14 penerapan tentang konsep anggaran .

		3. Penggunaan jenis-jenis anggaran sektor Publik	Sudah di hal .24 Keterkaitan penggunaan anggaran berdasarkan jenisnya dan
		4. Pada Narasumber atau informan di sebutkan berapa	Pada hal.43 keterkaitan informan
		5. Pada Data Sekunder kelengkapan data	Sudah di hal. 44 keterkaitan Data pedoman dan laporan
4	Dr.Darmanto,M.Ed	1. Sesuaikan Tulisan dengan Pedoman TAPM	Sudah di akomodir sesuai dengan pedoman TAPM
		2. Apa yang di Tulis/Di Terima ,harus ada di Draf Panduan	Sudah sesuai dengan Draf yang ada .
		3. Perbaiki tata Letak/Tulis & Penggunaan bahasa Indonesia	Sudah sesuai dengan draf yang ada.

